

PROFIL SANITASI SEKOLAH

TAHUN 2020



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



PROFIL SANITASI SEKOLAH

TAHUN 2020



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF Indonesia, GIZ dan SNV Indonesia

Profil Sanitasi Sekolah 2020

ISSBN :

Tim Penyusun :

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
UNICEF Indonesia, GIZ dan SNV Indonesia

Pengarah:

Jumeri, S.TP., M.Si.

Penanggungjawab:

Dr. Sutanto, SH. MA

Muhammad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

Drs. L. Manik Mustikohendro, M.Si

Penulis:

Abdul Hakim, S.Kom

Dra. Asimiyati, M.M

Katman, S.Pd., MA

Satriyo Wibowo

Waadarrahman, S.E., M.E

Dukungan Teknis:

Reza Hendrawan, UNICEF Indonesia

Aline Ardhiani, UNICEF Indonesia

Rigil Munajat, GIZ Fit for School

Saniya Niska, SNV Indonesia

Pengolah Data:

Drs. Wahono

Desain dan layout:

SPEAK Indonesia

Foto Oleh:

SNV Indonesia (halaman cover, 1, 6, 7, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39)

UNICEF Indonesia (halaman 2, 3, 5, 11, 16)

GIZ Indonesia (halaman 18)

SPEAK Indonesia (halaman 19, 27, 29)

KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Peserta didik merupakan aset atau modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga dan dilindungi kesehatannya. Jumlah penduduk usia sekolah sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan melalui belajar dari rumah secara virtual/ daring dan tidak bisa melalui tatap muka terutama pada wilayah zona merah dan oranye. Walaupun zona hijau dan zona kuning sudah mendapatkan izin pembukaan satuan pendidikan, namun satuan pendidikan harus mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka antara lain meliputi ketersediaan sarana Air, sanitasi dan kebersihan.

Untuk itu kami menerbitkan Buku Profil Sanitasi Sekolah 2020, agar pemangku kebijakan pendidikan di berbagai jenjang dan tingkatan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh tentang kondisi satuan pendidikan yang memiliki akses air, akses sarana sanitasi dan akses higiene dalam hal ini sarana cuci tangan pakai sabun. Didalam buku ini juga menjelaskan provinsi di Indonesia yang memiliki akses air, sanitasi dan higiene dalam berbagai tingkatan layanan, seperti layanan dasar, layanan terbatas dan tidak layak. Berdasarkan data Dapodik, sampai saat ini di Indonesia masih ada 6 dari 10 sekolah yang tidak memiliki sarana cuci tangan pakai sabun. 1 dari 3 sekolah tidak memiliki akses jamban yang layak dan terpisah, serta 1 dari 5 sekolah tidak memiliki akses air bersih yang cukup.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya, termasuk kepada UNICEF, GIZ dan SNV yang telah memberikan dukungan teknis, sehingga Buku Profil Sanitasi Sekolah 2020 ini dapat diterbitkan.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah



Jumeri, S.TP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada masa pandemi COVID-19 keberlangsungan proses pembelajaran dilakukan dengan belajar dari rumah. Adapun bagi wilayah yang terdapat di zona hijau dan kuning baru dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat. Pembukaan sekolah harus mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan serta sekolah harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran tatap muka salah satunya dengan memastikan ketersediaan sarana air, sanitasi dan kebersihan atau higiene.

Satuan pendidikan harus menyiapkan akses air, akses sanitasi termasuk didalamnya jamban terpisah dan dalam kondisi layak serta akses higiene yakni sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sarana cuci tangan harus diletakkan didepan sekolah sehingga sebelum masuk sekolah peserta didik dapat mencuci tangannya dengan sabun dan air mengalir. Untuk itu sangatlah penting memastikan ketersediaan sarana sanitasi sekolah yakni akses air, akses dan akses higiene di sekolah.

Kami menyambut baik akan terbitnya buku Profil Sanitasi Sekolah 2020 ini sehingga dapat dijadikan acuan oleh pengambil keputusan dalam membuat perencanaan pemenuhan akses sanitasi sekolah. Dinas Pendidikan dapat merujuk pada data yang tersedia dalam buku ini untuk menyusun prioritas kegiatan salah satunya memastikan pemenuhan akses sanitasi sekolah.

Jakarta, Oktober 2020

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Muhammad Hasan Chabibie, S.T., M.Si.

FOREWORD

Government of Indonesia has committed to achieve Sustainable Development Goals (SDGs), including, including children in schools. Ensuring access to basic water, sanitation and hygiene (WASH) facilities and practices in schools has proven to reduce the risks of Covid19 transmission and diarrhea. Furthermore, WASH in Schools increase school participation and promote gender equality. It also gives children the opportunity to act as agents of change, in their families and communities.

In order to prevent virus transmission In the time of pandemics, the availability of WASH in Schools is being recognized as the most important element that should be available at schools before reopened. Recognizing the importance of school sanitation, Ministry of Education and Culture, has conducted a data analysis on the current water, sanitation and hygiene conditions across all schools of Indonesia. This publication, the 2020 WASH in Schools Profile is an updated status of previous publication in 2017. The profile consists of data highlights progress but also remaining gaps in WASH service provision. These are presented across all the main school types (private or public), location (province, district, or municipality) and characteristics (urban or rural). This approach is very much in line with the guidance of the Sustainable Development Goals (SDGs) that emphasize equity and equality, especially so for Target 4.a which underlines WASH in Schools as an integral part of efforts to ensure that all children have access to a safe learning environment.

The SDG goals will only be achieved if the goals are fully applied to all children. UNICEF Indonesia, in collaboration with GIZ Fit for School and SNV Indonesia greatly appreciate the efforts of the Ministry of Education and Culture to release this publication. The WASH in Schools data presented in this publication is critical to allow tracking of the three WASH in Schools indicators related to SDG Goals 4a. In addition, data in this publication can be a used for advocacy and to support commitments from stakeholders to achieve the SDGs target. We once again applaud the efforts of the Minister of Education and Culture and we are sure this excellent publication will be an invaluable resource for Indonesia to track SDG 4.a in the coming years.

Jakarta, September 2020

Ann Thomas



Chief of WASH
UNICEF Indonesia

Nicole Siegmund



Principal Advisor GIZ-Regional
Fit for School

Cécile Laborderie



WASH Sector Leader
SNV Netherlands
Development Organisation SNV

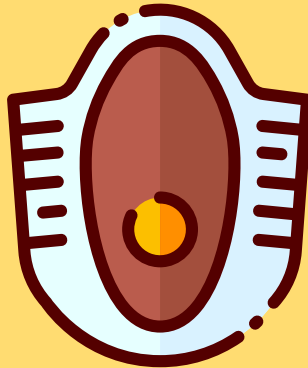


INFORMASI KUNCI

1 dari 5
sekolah
tidak memiliki
akses air yang
layak



73% sekolah
tidak memiliki
akses
sanitasi yang
layak



3 dari 5
sekolah
tidak memiliki
akses
kebersihan
yang layak



43,5 juta

peserta Didik pada 356,388 PAUD dan Sekolah
tidak memiliki akses kombinasi akses air,
sanitasi dan kebersihan



**Satu
dari tiga**
sekolah tidak
memiliki jamban/
toilet yang terpisah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Beberapa indikator utama SDG 4 terkait Pendidikan, terkait ketersediaan Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH) di sekolah, yaitu akses air minum dasar, akses sanitasi dasar, dan akses kebersihan dasar.

Untuk memantau perkembangan pencapaian indikator sanitasi sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pusat Data dan Teknologi Informasi, menyusun Profil Sanitasi Sekolah 2020, dengan dukungan teknis dari UNICEF Indonesia, GIZ *Fit for School* dan SNV Indonesia. Profil ini menyajikan data terkini kondisi Sanitasi Sekolah di seluruh sekolah di Indonesia berdasarkan data tahun 2019 dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sanitasi Sekolah merupakan salah satu pilar penting dalam memerangi penularan infeksi virus COVID-19, dengan praktik kebersihan yang aman. Contohnya mencuci tangan dengan sabun yang terbukti sangat penting dalam mencegah penularan COVID-19. Ketersediaan fasilitas kebersihan dasar, khususnya sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dan Air mengalir, menjadi salah satu syarat wajib bagi sekolah untuk dibuka kembali dalam rangka pandemi COVID-19. Profil Sanitasi Sekolah ini dapat digunakan untuk memetakan tingkat kerentanan sekolah dalam persiapan pembukaan kembali sekolah dan dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk mempercepat perbaikan sarana sanitasi di sekolah. Meningkatkan akses ke fasilitas dan layanan air, sanitasi dan kebersihan di sekolah akan membantu dalam memantau kemajuan terhadap target SDG, menjadikan Sanitasi Sekolah sebagai sumber data yang sangat penting bagi pemangku kepentingan tingkat nasional dan global.

Profil Sanitasi Sekolah 2020 ini menyajikan analisis berdasarkan jenis akses yang dipilih menurut jenjang pendidikan, menurut provinsi, menurut status sekolah (negeri atau swasta) dan menurut karakteristik sekolah (perkotaan atau pedesaan). Jenis akses mengacu pada akses air dasar, akses sanitasi dasar dan akses kebersihan dasar (fasilitas cuci tangan). Sedangkan jenjang pendidikannya adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Profil Sanitasi Sekolah ini tidak termasuk madrasah. Analisis yang mencakup karakteristik sekolah (perkotaan atau pedesaan) dan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini tersedia untuk pertama kalinya dalam publikasi ini.

Fakta Kunci

Akses pada Air, Sanitasi dan Kebersihan Dasar tersedia semuanya

- Hanya 16% satuan Pendidikan yang memiliki akses pada semua layanan dasar, yaitu tersedia air, sanitasi dan kebersihan sekaligus.
- 43,5 juta anak Indonesia tidak memiliki akses pada salah satu atau kombinasi dari akses air minum dasar, sanitasi dasar dan kebersihan dasar di satuan Pendidikan mereka.
- 356,388 satuan Pendidikan tidak memiliki akses pada salah satu atau kombinasi dari layanan air minum dasar, sanitasi dasar dan kebersihan dasar di satuan Pendidikan mereka.

Akses Air Dasar

- Satu dari Lima satuan Pendidikan atau sama dengan 82,575 satuan Pendidikan tidak memiliki sarana air yang layak. Angka ini setara dengan 10 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akses pada layanan atau sarana air yang layak di satuan Pendidikan mereka.
- Sebagian besar satuan Pendidikan yang tidak memiliki akses pada sarana air yang layak terdapat di wilayah perdesaan dan satuan Pendidikan pada jenjang PAUD
- Kesenjangan pada akses sarana air di satuan Pendidikan masih sangat tinggi. Di perkotaan 8 dari 10 satuan pendidikan (80%) sudah memiliki akses pada layanan air minum. Tapi di perdesaan hanya tiga dari empat sekolah (75%) yang memiliki akses atau layanan air minum.

Akses Sanitasi Dasar

- Tiga dari Sebelas satuan pendidikan (27%) atau sama dengan 309,783 satuan Pendidikan tidak memiliki sarana sanitasi yang layak. Angka ini setara dengan 37,7 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akses pada layanan atau sarana sanitasi yang layak di satuan Pendidikan mereka.
- Sebagian besar satuan Pendidikan yang tidak memiliki akses pada sarana sanitasi yang layak terdapat di wilayah perdesaan dan satuan Pendidikan pada jenjang PAUD
- Kesenjangan pada akses sarana sanitasi di satuan Pendidikan masih sangat tinggi. Di perkotaan lebih banyak satuan pendidikan (36%) yang sudah memiliki akses pada layanan sanitasi. Tapi di perdesaan hanya mencapai 21% atau hampir empat dari lima sekolah di perdesaan (78%) yang tidak memiliki akses atau layanan sanitasi yang memadai.

Akses Kebersihan Dasar

- Dua dari lima satuan Pendidikan pada semua jenjang (41%) atau sama dengan 251,308 satuan Pendidikan tidak memiliki sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. Angka ini setara dengan 30,7 juta anak Indonesia yang tidak dapat melakukan kegiatan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada satuan Pendidikan mereka.
- Sebagian besar satuan Pendidikan yang tidak memiliki akses pada sarana kebersihan yang layak terdapat di wilayah perdesaan dan satuan Pendidikan pada jenjang PAUD
- Kesenjangan pada akses sarana kebersihan di satuan Pendidikan masih sangat tinggi. Di perkotaan hampir 1 dari 2 satuan pendidikan (49%) sudah memiliki akses pada sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sebaliknya, di perdesaan sekitar 3 dari 8 sekolah atau 36% yang memiliki akses atau kebersihan tangan.

EXECUTIVE SUMMARY

The Government of Indonesia is on track to meet its targets for Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. Some of the key indicators of SDG 4 related to Education, pertain to availability of Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in schools, namely basic access to drinking water, basic access to sanitation, and basic access hygiene.

To track the progress on WASH in Schools, the Ministry of Education and Culture through the Directorate General of Early Childhood Education, Primary and Secondary Education and the Center for Data and Information, developed the WASH in Schools profile 2020, with technical support from UNICEF Indonesia, GIZ Fit for School and SNV Indonesia. This profile presents the latest data on WASH conditions across all schools in Indonesia based on the 2019 data from the Dapodik system.

WASH is one of the cornerstones in the fight against transmission of COVID-19 infections, with safe hygiene practices, such as handwashing with soap having proven to be critical in preventing COVID-19 transmission. The availability of basic WASH facilities, especially Handwashing with soap and running water, is one of the mandatory conditions for schools to reopen in the context of the COVID-19 pandemic. The WASH in Schools Profile can be used to map the level of vulnerability of schools in preparation for reopening schools and can be used as an advocacy tool to accelerate WASH improvements in schools. Increasing access to WASH facilities and services in schools will help in monitoring progress against SDG targets, making the WASH in Schools a very important data source for national and global stakeholders

The WASH in Schools Profile 2020 presents an analysis based on the type of access disaggregated by level of education, by province, by school status (public or private) and by school characteristics (urban or rural). The types of access refer to basic access to water, basic access to sanitation and basic access to hygiene (hand washing facilities). While the education levels are, Early Childhood Education (PAUD), Elementary School (SD), Junior Secondary School (SMP), Senior Secondary School (SMA), Vocational High School (SMK) and Special School (SLB). This WASH in Schools Profile does not include madrasah. The analysis including characteristics of the school (urban or rural) and Early Child Education level are available for the first time in this publication.

Key Facts

Access to Basic Water, Basic Sanitation and Basic Hygiene are all available

- Only 16% of education units have access to all basic services, namely providing water, sanitation and hygiene at the same time.
- 43.5 million Indonesian children do not have access to one or a combination of basic drinking water, basic sanitation and basic hygiene services in their education units.
- 356,388 Education units do not have access to one or a combination of basic drinking water, basic sanitation and basic hygiene services in their education units.

Access to Basic Drinking Water

- One in five education units or equal to 82,575 education units do not have adequate water facilities. This figure is equivalent to 10 million Indonesian children who do not have access to proper water services or facilities in their education units.
- Most of the education units that do not have access to proper water facilities are located in rural areas and education units at the PAUD level
- The gap in access to water facilities in education units is still very high. In urban areas, 8 out of 10 education units (80%) already have access to drinking water services. But in rural areas only three out of four schools (75%) have access to or services to drinking water.

Access to Basic sanitation

- Three out of eleven education units (27%) or equal to 309,783 education units do not have proper sanitation facilities. This figure is equivalent to 37.7 million Indonesian children who do not have access to proper sanitation services or facilities in their education units.
- Most of the education units that do not have access to proper sanitation facilities are in rural areas and education units at the PAUD level
- The gap in access to sanitation facilities in education units is still very high. In urban areas more education units (36%) already have access to sanitation services. But in rural areas, only 21% or nearly four of five schools in rural areas (78%) do not have access or adequate sanitation services.

Access to Basic Hygiene

- Two out of five education units at all levels (41%) or equal to 251,308 education units do not have hand washing facilities equipped with soap and running water. This figure is equivalent to 30.7 million Indonesian children who cannot wash their hands with soap and running water in their education units.
- Most education units that do not have access to proper hygiene facilities are in rural areas and education units at the PAUD level
- The gap in access to hygiene facilities in education units is still very high. In urban areas, almost 1 in 2 educational units (49%) already have access to hand washing facilities with soap and running water. On the other hand, in rural areas about 3 out of 8 schools or 36% have access or hand hygiene.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Direktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	v
Kata Pengantar Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	vi
Foreword	vii
Infografik	viii
Ringkasan Eksekutif	x
Executive Summary	xii
Daftar Isi	xiv
1. Pendahuluan	1
2. Data dan Metodologi	7
3. Indeks Sanitasi Sekolah	11
4. Indikator Sanitasi Sekolah	15
5. Gambaran Kondisi Sanitasi Sekolah per Jenjang 2020	23
6. Analisa Biaya Modal dan Operasional	39
7. Kesimpulan dan Rekomendasi	43
Daftar Referensi	46
Lampiran	47

1

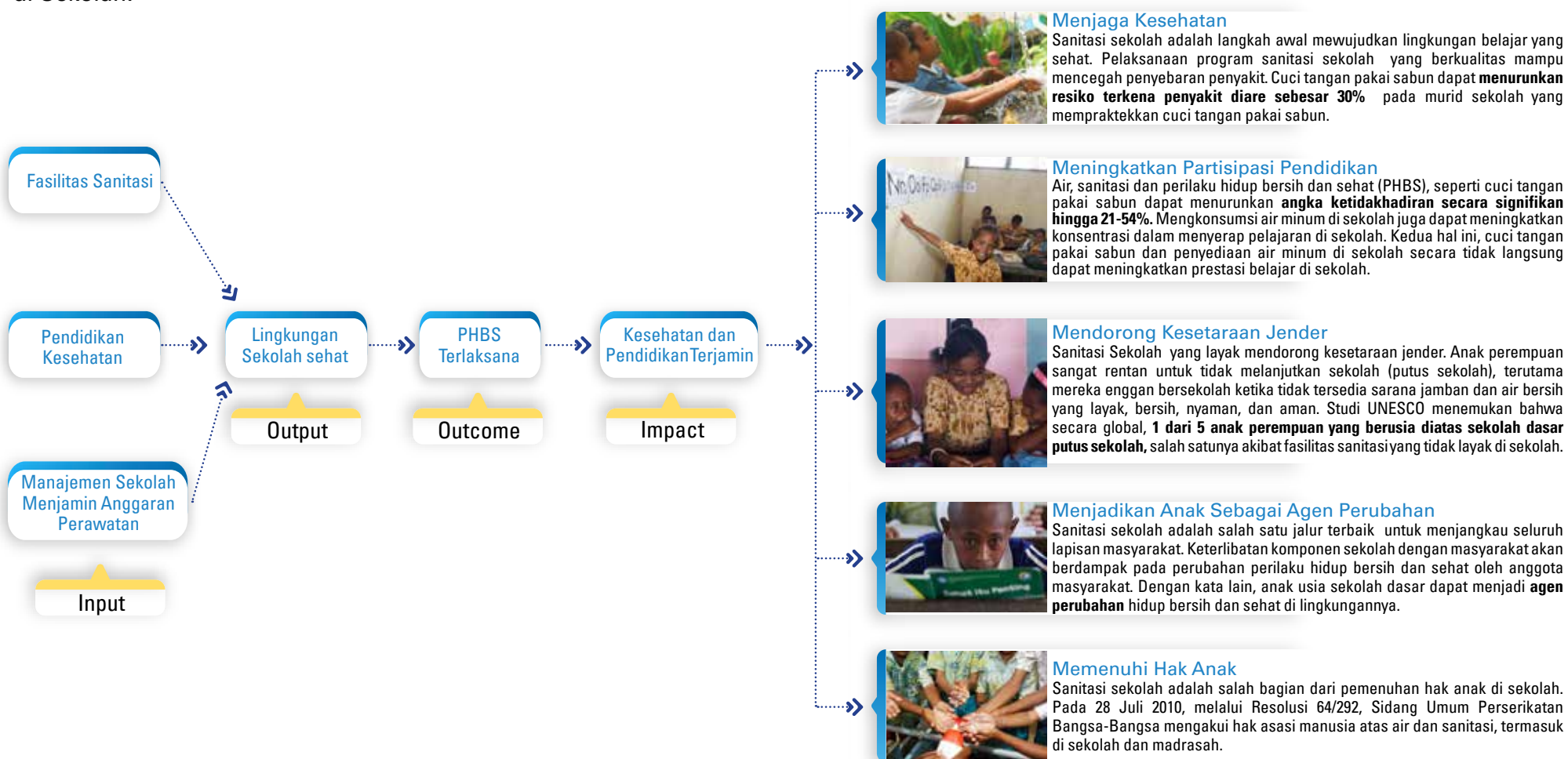
PENDAHULUAN



1.1 SANITASI SEKOLAH

Kenapa Sanitasi Sekolah penting? Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia, ketersediaan sarana air, sanitasi dan kebersihan yang memadai di sekolah akan memberikan dampak yang luar biasa.

Buku Profil Sanitasi Sekolah ini memberikan hasil analisa Sanitasi Sekolah Tahun 2020 dan bukan hanya fokus pada kemajuan yang telah dicapai, tetapi juga menginformasikan kesenjangan yang luar biasa dalam penyediaan layanan. Publikasi sebelumnya, yaitu Profil Sanitasi Sekolah Tahun 2017 telah digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan terkait untuk dapat mengalokasikan sumber daya guna mempercepat pencapaian kondisi Sanitasi sekolah yang layak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketersediaan sarana air, sanitasi dan kebersihan di Sekolah.



1.2 KONSEP SANITASI SEKOLAH



Apa yang dimaksud dengan Sanitasi Sekolah? Sebuah sekolah dapat dikatakan menerapkan Sanitasi Sekolah yang baik apabila sekolah tersebut dapat memenuhi tiga aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pertama, sekolah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, terutama akses pada sarana air bersih yang aman dari pencemaran, sarana sanitasi (jamban) yang berfungsi dan terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, serta fasilitas cuci tangan pakai sabun. Kedua, sekolah melaksanakan kegiatan Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sekolah, seperti kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) secara rutin dan memastikan pelaksanaan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) secara konsisten. Ketiga, adanya dukungan manajemen sekolah untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi dan biaya kegiatan PHBS



1.4 PERKEMBANGAN SANITASI SEKOLAH 2016 - 2020



2019



Pelaksanaan Bimtek Sanitasi Sekolah ke 1000 sekolah dasar di seluruh Indonesia



Pengembangan indikator nasional Sanitasi Sekolah kedalam Strata UKS/M

2020



Pengembangan Opsi CTPS 2020 dan telah disosialisasikan ke 514 kabupaten/ kota dan telah menjangkau 50,000 sekolah di seluruh Indonesia



1.3 SANITASI SEKOLAH DAN COVID19

Penutupan sekolah sebagai akibat pandemi COVID-19 menciptakan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berdampak bagi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Penutupan yang berkepanjangan terpaksa dilakukan untuk menjamin keselamatan peserta didik, namun hal itu memiliki dampak pada proses belajar dan mengajar serta mengganggu layanan berbasis sekolah. Misalnya pemenuhan gizi, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan anak-anak yang rentan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengidentifikasi berbagai tindakan yang perlu diterapkan (protocol) agar sekolah dapat dibuka kembali dan beroperasi dengan aman. Protokol ini menekankan pentingnya kebersihan diri untuk mengurangi resiko penularan dan merekomendasikan semua sekolah untuk menerapkan cuci tangan secara teratur, memastikan disinfeksi setiap hari dan pembersihan permukaan, menyediakan fasilitas air dasar, sanitasi dan kebersihan, dan ikuti yang sesuai prosedur pembersihan dan dekontaminasi lingkungan. Namun, tidak semua sekolah dapat memenuhi, persyaratan tersebut. Oleh karena itu, komitmen untuk pemenuhan sarana air, sanitasi dan kebersihan di sekolah sangat penting untuk meningkatkan keamanan sekolah selama pandemi COVID-19 dan seterusnya.



2

DATA DAN METODOLOGI



2.1 DATA

Sumber Data

Dapodik pada semester genap, cut off Bulan Desember 2019.

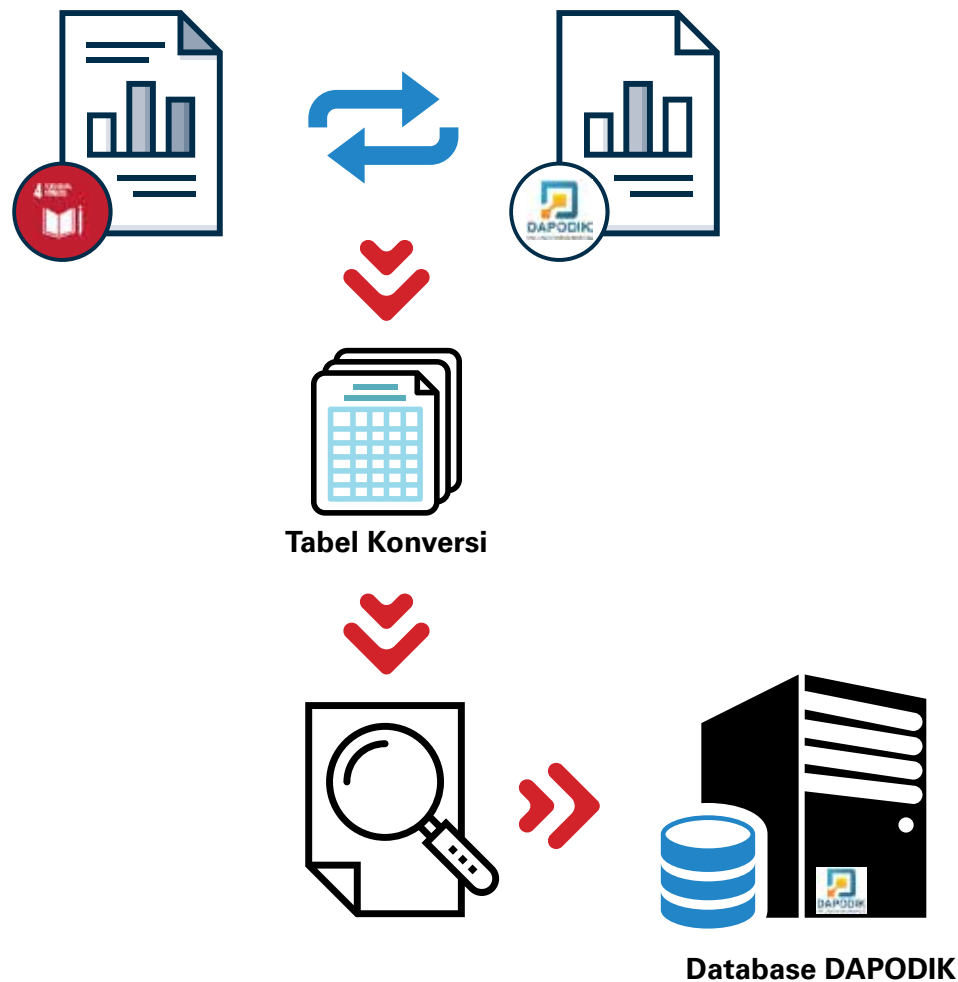
Variable Data

- Semua jenjang Pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- Satuan pendidikan berdasarkan karakteristik sekolah, yaitu perkotaan atau perdesaan.
- Satuan pendidikan berdasarkan status sekolah, yaitu swasta atau negeri

Keterbatasan Data

- Tidak semua operator memasukkan data yang benar dan tepat
- Tidak ada sistem verifikasi independent untuk memastikan kualitas data

2.2 METODOLOGI DAN ANALISA DATA



2.3 INDIKATOR SANITASI SEKOLAH



Pada tingkat global, sanitasi sekolah merupakan prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam SDGs (Sustainable Development Goals) Tujuan 4.a dan Tujuan 6.1 & 6.2.

Tujuan 4.a menargetkan “Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua”

Tujuan 6.1 dan 6.2 mengamanatkan “Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua”, serta “Pada tahun 2030, mencapai akses adil dan memadai terhadap sanitasi dan kebersihan bagi semua, mengakhiri buang air besar sembarangan, serta memberi perhatian khusus bagi kebutuhan anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya”

Indek	Air Minum	Sanitasi	Kebersihan
Tidak Ada Layanan Sekolah tidak memiliki layanan air, sanitasi dan kebersihan	Tidak Ada Layanan Sekolah dengan sumber air tidak layak atau tidak ada sumber air dilingkungan sekolah	Tidak Ada Layanan Sekolah tidak memiliki toilet, atau toilet tidak layak	Tidak Ada Layanan Sekolah tanpa sarana cuci tangan
Layanan Terbatas Sekolah yang memiliki akses dasar pada satu atau maksimal dua indikator	Layanan Terbatas Sekolah dengan sumber air layak namun tidak cukup (tidak tersedia sepanjang waktu)	Layanan Terbatas Sekolah yang memiliki toilet layak tetapi tidak terpisah dan kondisinya rusak berat	Layanan Terbatas Sekolah dengan sarana cuci tangan namun tidak terdapat sabun dan air mengalir
Layanan Dasar Sekolah dengan kombinasi tiga akses dasar yaitu air minum, sanitasi dan kebersihan	Layanan Dasar Sekolah dengan sumber air layak. Tersedia dilingkungan sekolah dan cukup (tersedia sepanjang waktu)	Layanan Dasar Sekolah memiliki toilet layak dan terpisah dengan kondisi baik dan rusak ringan	Layanan Dasar Sekolah dengan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

2.4 SANITASI SEKOLAH DALAM KERANGKA SDGs DAN UKS

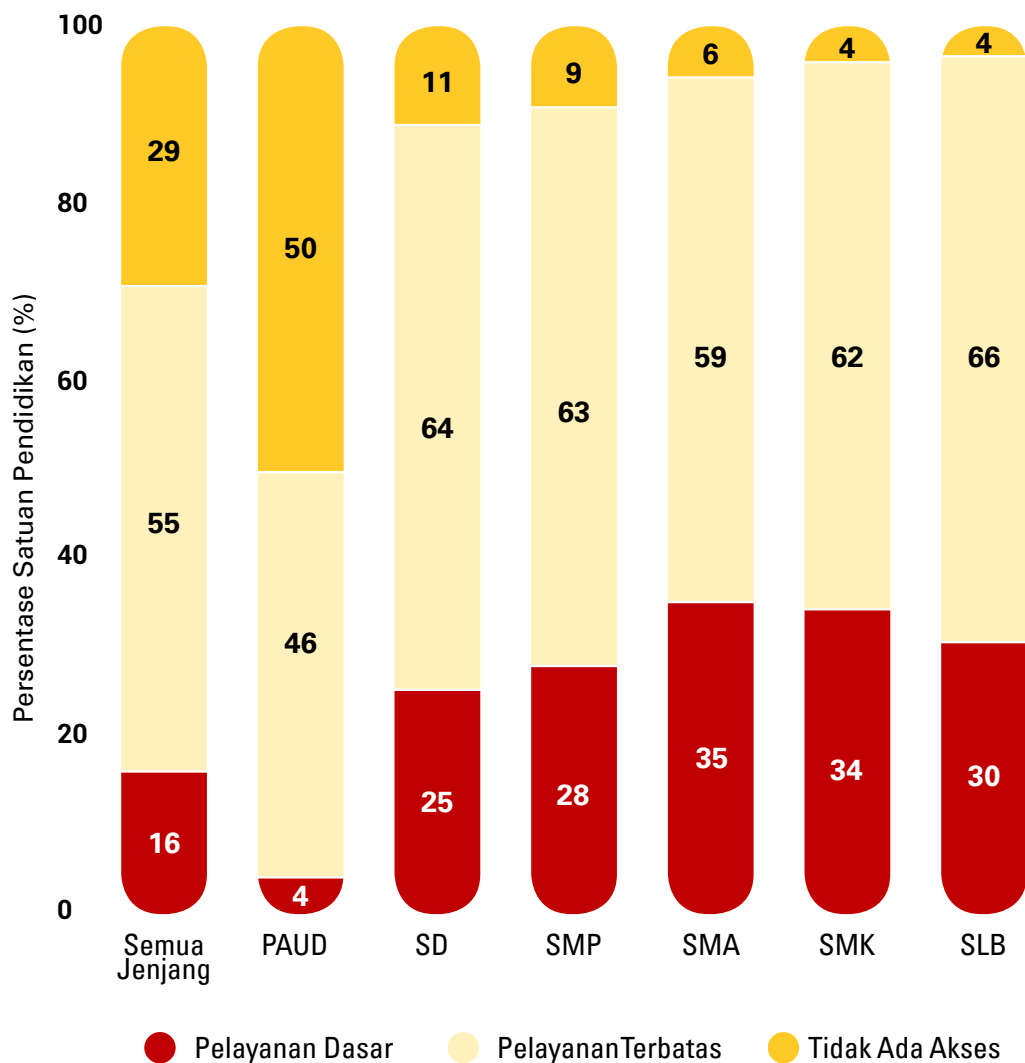


3

**INDEKS
SANITASI
SEKOLAH 2020**



3.1 INDEKS SANITASI SEKOLAH



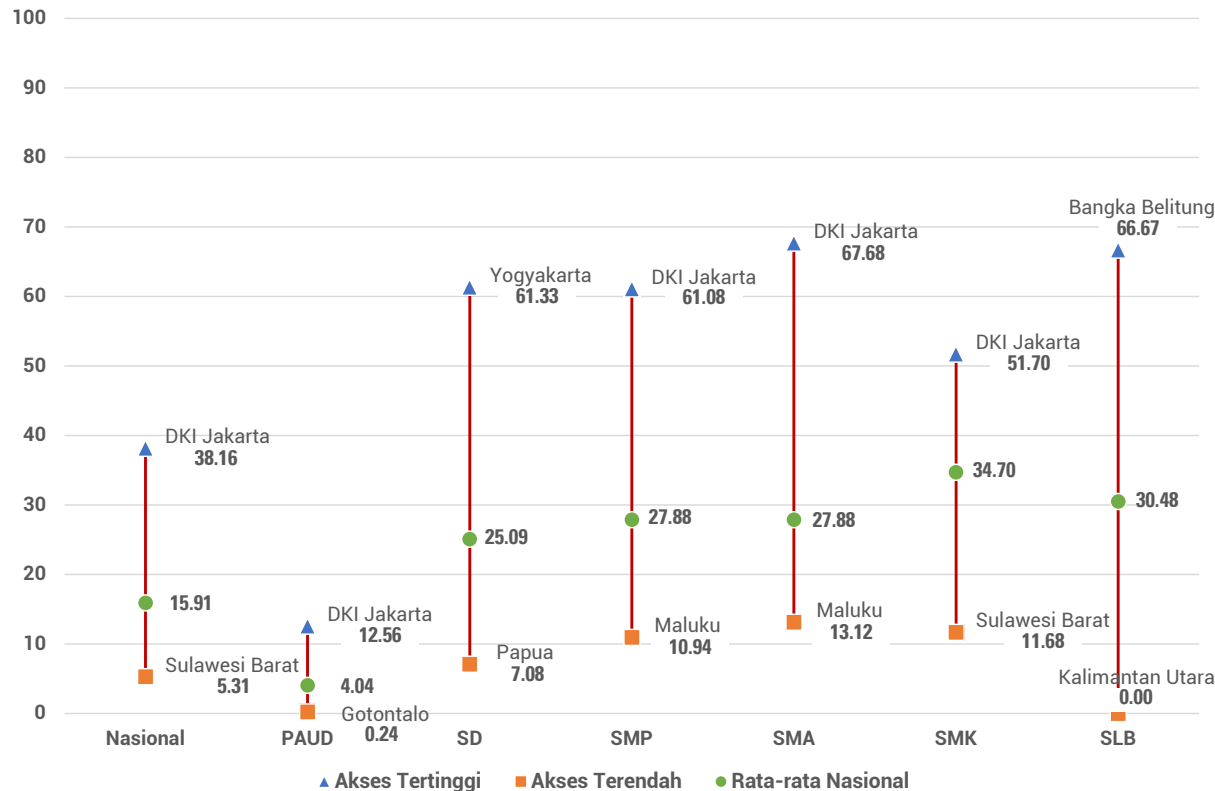
FAKTA

- Hanya 16% satuan pendidikan yang memiliki akses pada semua layanan dasar, yaitu tersedia air, sanitasi dan kebersihan sekaligus. Sisanya, 55% memiliki layanan yang terbatas; dan 29% tidak memiliki sarana air minum, sanitasi dan kebersihan sama sekali.
- 43,5 juta anak Indonesia tidak memiliki akses pada salah satu atau kombinasi dari layanan air minum dasar, sanitasi dasar dan kebersihan dasar di satuan pendidikan mereka.
- 356,388 satuan pendidikan tidak memiliki akses pada salah satu atau kombinasi dari layanan air minum dasar, sanitasi dasar dan kebersihan dasar di satuan pendidikan mereka.
- Indeks sanitasi sekolah yang paling rendah terdapat pada jenjang PAUD yaitu hanya 4% dari total 203,505 PAUD yang ada diseluruh Indonesia.
- Indeks sanitasi sekolah yang paling tinggi terdapat pada jenjang SMA, yaitu 35% dari total 13,931 SMA di seluruh Indonesia.
- 1 dari 2 PAUD tidak memiliki akses pada semua sarana air, sanitasi dan kebersihan sekaligus.

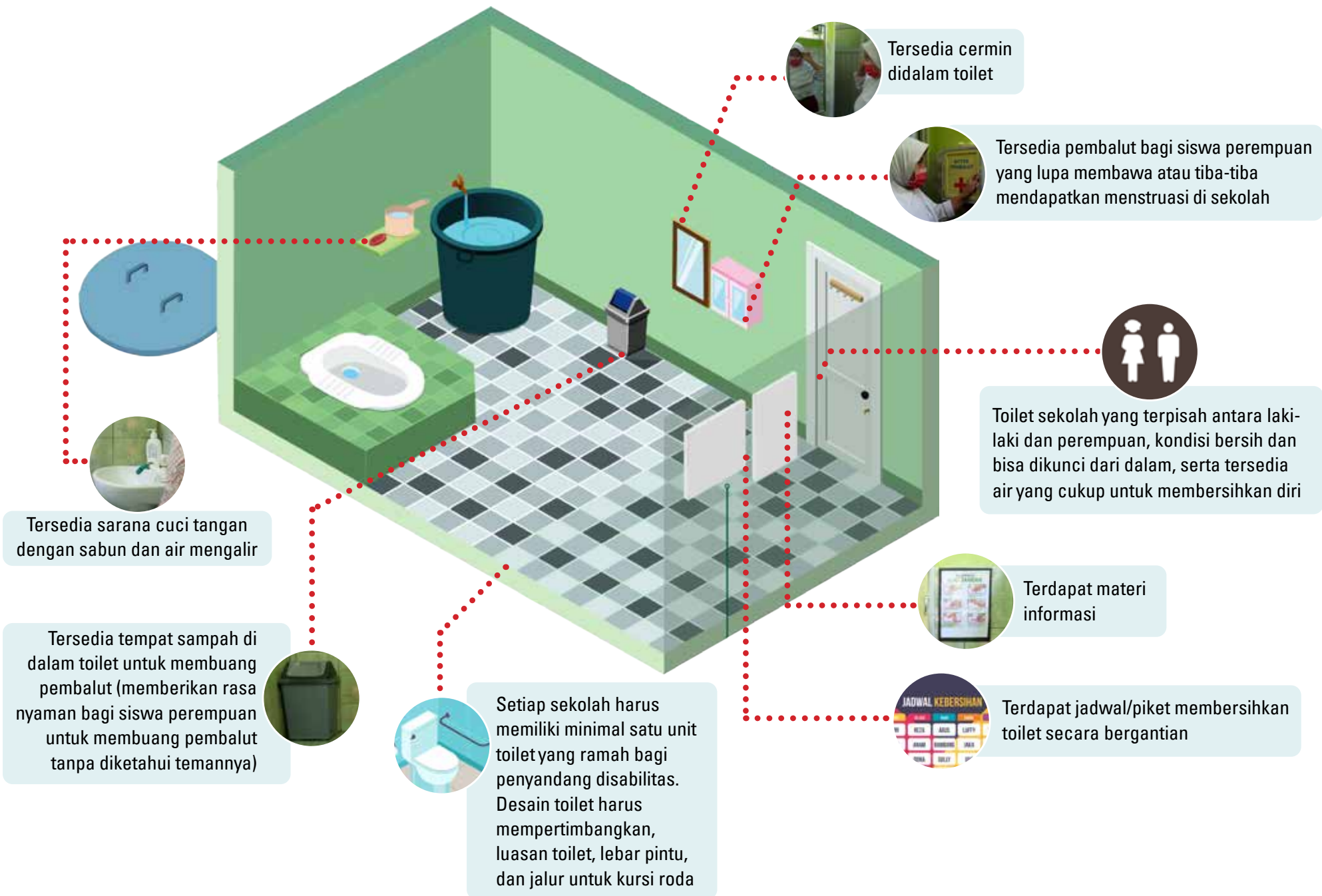
CATATAN:

Indeks Sanitasi Sekolah adalah indikator komposit atau pendekatan statistik yang menggabungkan tiga indikator layanan Sanitasi Sekolah sekaligus. Sekolah dianggap memenuhi indeks pelayanan dasar apabila sekolah tersebut memiliki akses pada semua indikator, yaitu layanan air dasar, layanan sanitasi dasar dan layanan kebersihan dasar.

INDEKS SANITASI SEKOLAH



- Secara Nasional, Provinsi DKI Jakarta (38,16%), Provinsi Bali (27,66%), dan Provinsi Bangka Belitung (26,29%), adalah tiga provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah tertinggi untuk semua jenjang
- Provinsi Sulawesi Barat (5,31%), Provinsi Maluku (7,25%), dan Provinsi Maluku Utara (7,26%), adalah tiga provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah terendah untuk semua jenjang
- Provinsi Jakarta (12,56%) merupakan provinsi yang tertinggi untuk indeks sanitasi sekolah pada Jenjang PAUD, sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat (0,24%)
- Hanya 1 dari 4 SD yang memiliki akses pada semua layanan, yaitu memiliki sarana air, sanitasi dan kebersihan sekaligus.
- Provinsi Yogyakarta (61,33%) merupakan yang provinsi tertinggi untuk indeks sanitasi sekolah pada Jenjang SD, sebaliknya Provinsi Papua (7,08%) yang paling rendah.
- Pada jenjang SMP, SMA dan SMK, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan indeks sanitasi sekolah tertinggi, yaitu 61,08% untuk SMP, 67,68% untuk SMA, dan 51,7% untuk SMK.
- Pada jenjang SMP dan SMA, Provinsi Maluku menempati provinsi dengan Indeks Sanitasi Sekolah terburuk, yaitu 10,94% untuk SMP dan 13,12% untuk SMA. Sedangkan untuk SMK, Provinsi Sulawesi Barat adalah yang terburuk, yaitu, 11,68%.
- Provinsi Bangka Belitung (66,67%) merupakan provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah tertinggi untuk SLB sebaliknya Kalimantan Utara yang terburuk dengan 0%.

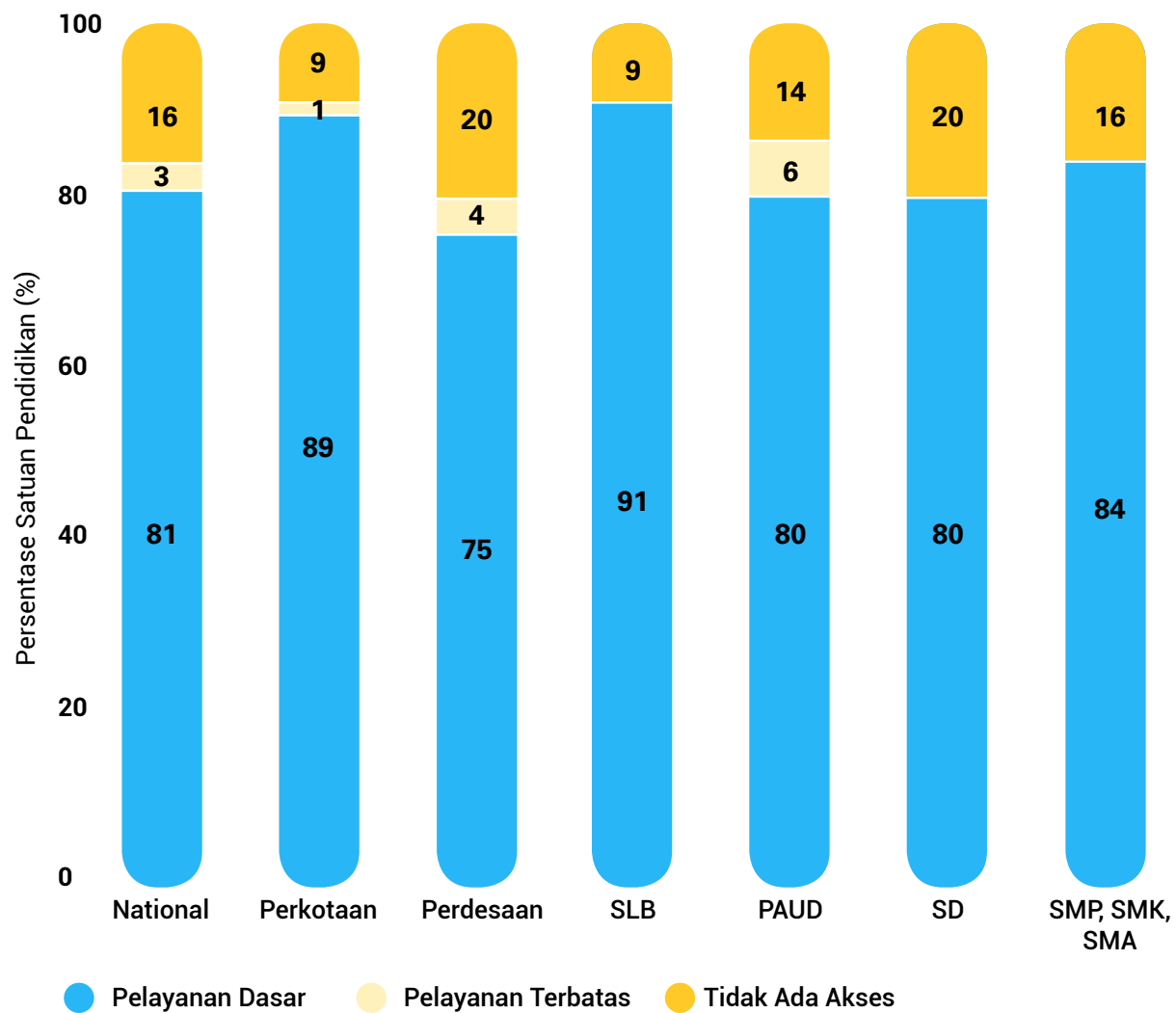


4

INDIKATOR SANITASI SEKOLAH 2020



4.1 INDIKATOR AKSES AIR

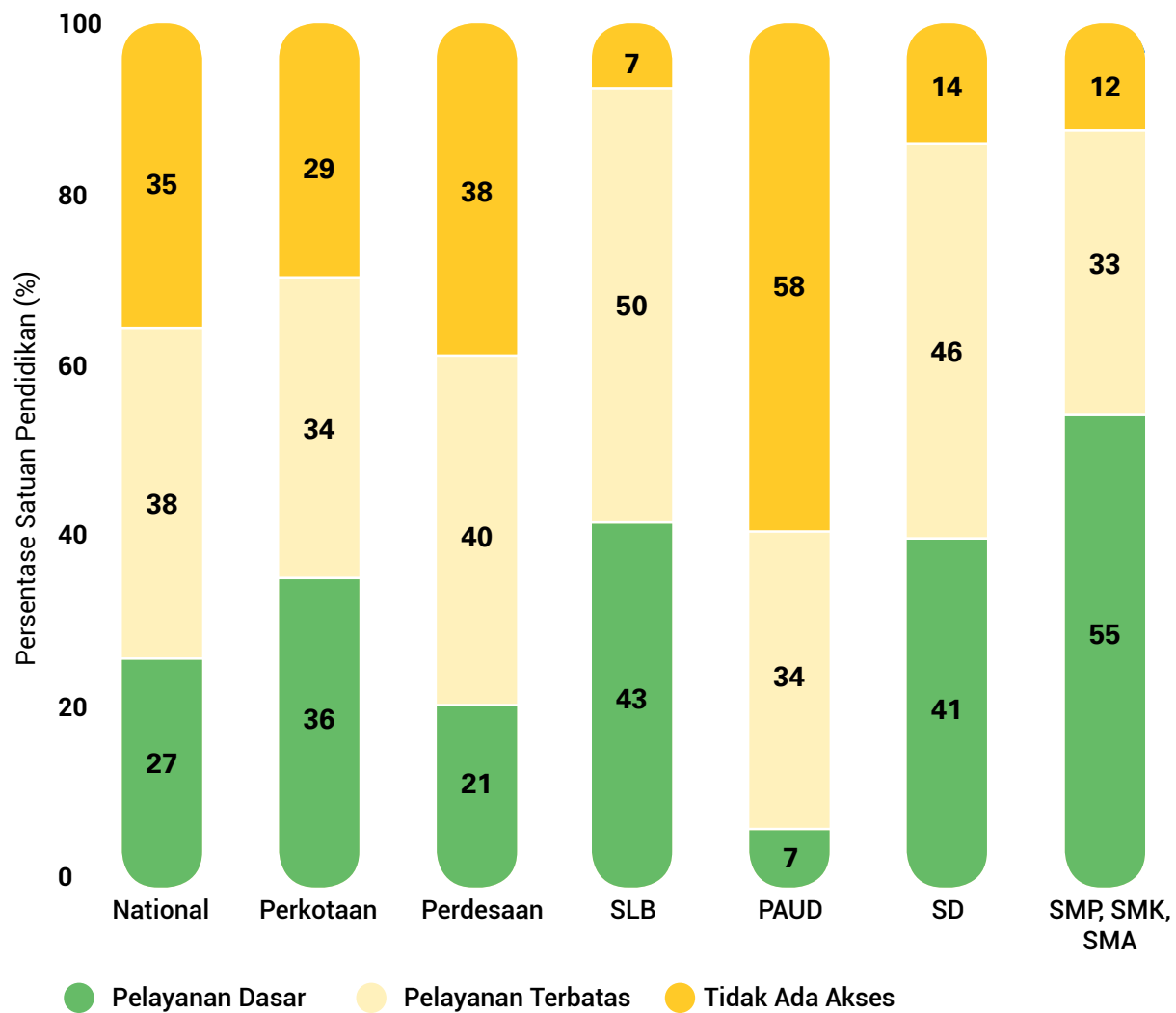




FAKTA

- Satu dari Lima satuan pendidikan atau sama dengan 82,575 satuan pendidikan tidak memiliki sarana air yang layak. Angka ini setara dengan 10 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akses pada layanan atau sarana air yang layak di satuan pendidikan mereka.
- Sebagian besar satuan pendidikan yang tidak memiliki akses pada sarana air yang layak terdapat di wilayah perdesaan dan satuan pendidikan pada jenjang PAUD
- Kesenjangan pada akses sarana air di satuan pendidikan masih sangat tinggi. Di perkotaan 8 dari 10 satuan pendidikan (80%) sudah memiliki akses pada layanan air minum. Tapi di perdesaan hanya tiga dari empat sekolah (75%) yang memiliki akses atau layanan air minum.
- Dua dari Sepuluh (20%) PAUD atau sama dengan 40,955 PAUD tidak memiliki akses pada sarana air minum. Angka ini setara dengan 1 juta peserta didik PAUD di seluruh Indonesia yang tidak memiliki akses pada sarana air yang layak.
- Dua dari Sepuluh (20%) SD atau sama dengan 30,334 SD tidak memiliki akses pada sarana air minum. Angka ini setara dengan 5 juta peserta didik SD di seluruh Indonesia yang tidak memiliki akses pada sarana air yang layak.
- Cakupan layanan paling tinggi terdapat pada jenjang SLB, yaitu 91% dari total 2,270 SLB di seluruh Indonesia. Hanya 212 SLB saja di seluruh Indonesia yang tidak memiliki akses pada sarana air minum yang layak.

4.2. INDIKATOR AKSES SANITASI

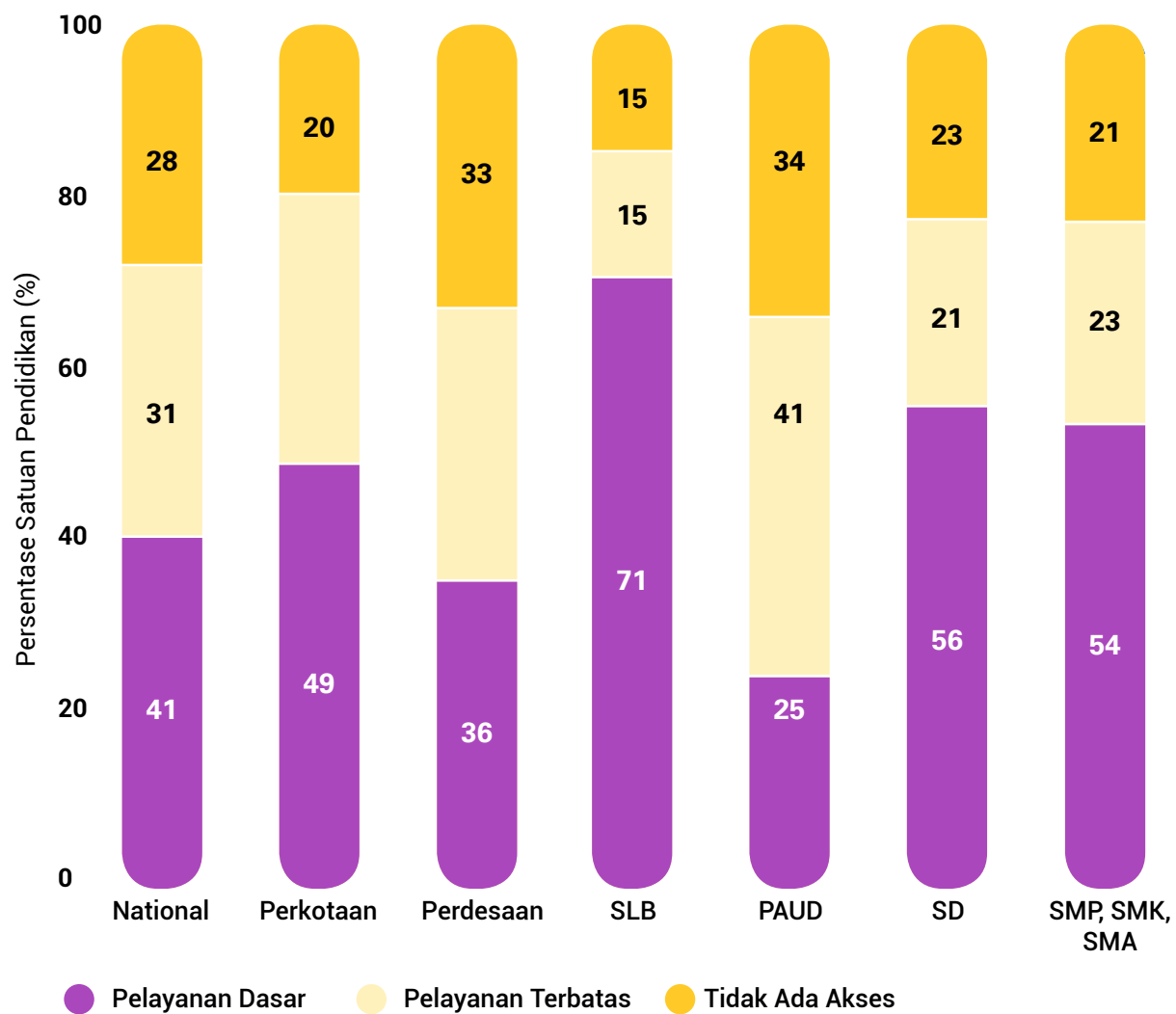




FAKTA

- Tiga dari Sebelas satuan pendidikan (27%) atau sama dengan 309,783 satuan pendidikan tidak memiliki sarana sanitasi yang layak. Angka ini setara dengan 37,7 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akses pada layanan atau sarana sanitasi yang layak di satuan pendidikan mereka.
- Sebagian besar satuan pendidikan yang tidak memiliki akses pada sarana sanitasi yang layak terdapat di wilayah perdesaan dan satuan pendidikan pada jenjang PAUD
- Kesenjangan pada akses sarana sanitasi di satuan pendidikan masih sangat tinggi. Di perkotaan lebih banyak satuan pendidikan (36%) yang sudah memiliki akses pada pada layanan sanitasi. Tapi di perdesaan hanya mencapai 21% atau hampir empat dari lima sekolah di perdesaan (78%) yang tidak memiliki akses atau layanan sanitasi yang memadai.
- Sekitar 93% PAUD atau sama dengan 189,190 PAUD tidak memiliki akses pada sarana toilet yang terpisah dan berfungsi. Angka ini setara dengan 4,8 juta peserta Didik PAUD di seluruh Indonesia yang tidak memiliki akses pada sarana sanitasi yang layak di satuan pendidikan PAUD yang mereka jalani.
- Pada jenjang SD, enam dari sepuluh SD atau sama dengan 88,387 SD tidak memiliki akses pada sarana sanitasi yang layak. Angka ini berdampak pada 18,2 juta peserta didik SD di seluruh Indonesia yang tidak bisa menikmati akses pada sarana sanitasi yang layak.
- Cakupan layanan paling tinggi terdapat pada jenjang SMP, SMA dan SMK, yaitu 55% di seluruh Indonesia yang telah memiliki akses pada sarana sanitasi yang layak.

4.3. INDIKATOR AKSES KEBERSIHAN

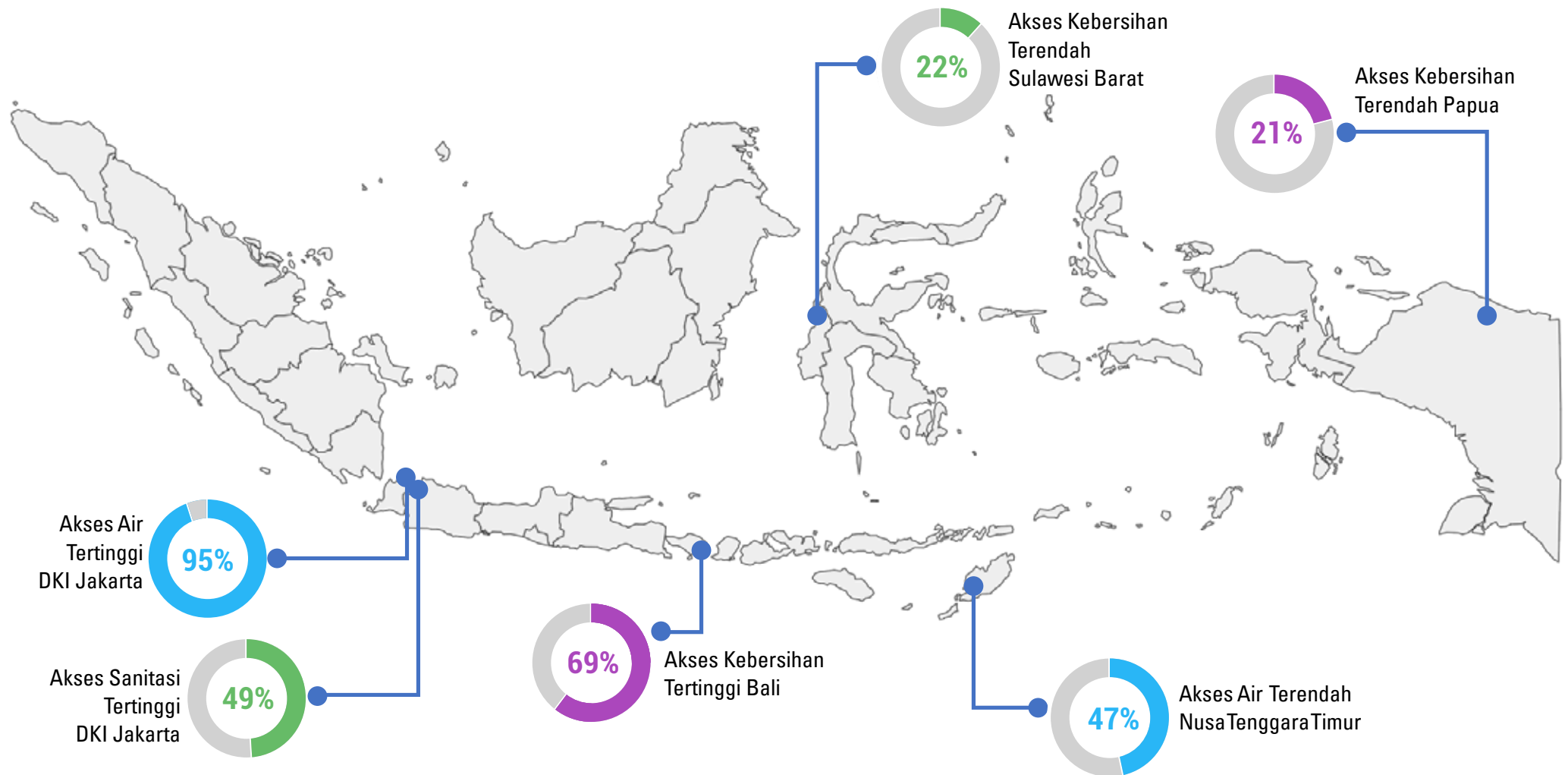




FAKTA

- Dua dari lima satuan pendidikan pada semua jenjang (41%) atau sama dengan 251,308 satuan pendidikan tidak memiliki sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. Angka ini setara dengan 30,7 juta anak Indonesia yang tidak dapat melakukan kegiatan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada satuan pendidikan mereka.
- Sebagian besar satuan pendidikan yang tidak memiliki akses pada sarana kebersihan yang layak terdapat di wilayah perdesaan dan satuan pendidikan pada jenjang PAUD
- Kesenjangan pada akses sarana kebersihan di satuan pendidikan masih sangat tinggi. Di perkotaan hampir 1 dari 2 satuan pendidikan (49%) sudah memiliki akses pada sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sebaliknya, di perdesaan sekitar 3 dari 8 sekolah atau 36% yang memiliki akses kebersihan tangan.
- Satu dari empat (25%) PAUD tidak memiliki akses pada sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini berdampak negatif pada hampir 5 jutaan peserta didik PAUD di seluruh Indonesia karena tidak dapat membiasakan diri dengan praktek cuci tangan pakai sabun yang benar karena tidak adanya akses pada sarana cuci tangan yang layak di satuan pendidikan mereka.
- Hampir satu dari dua (46%) SD atau sama dengan 65,945 SD tidak memiliki akses pada sarana kebersihan tangan. Angka ini setara dengan hampir 15 juta peserta didik SD di seluruh Indonesia yang tidak memiliki akses pada sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- Cakupan layanan paling tinggi terdapat pada jenjang SLB, yaitu 71% dari total 2,270 SLB di seluruh Indonesia.

PROVINSI DENGAN AKSES DASAR TERTINGGI DAN TERENDAH

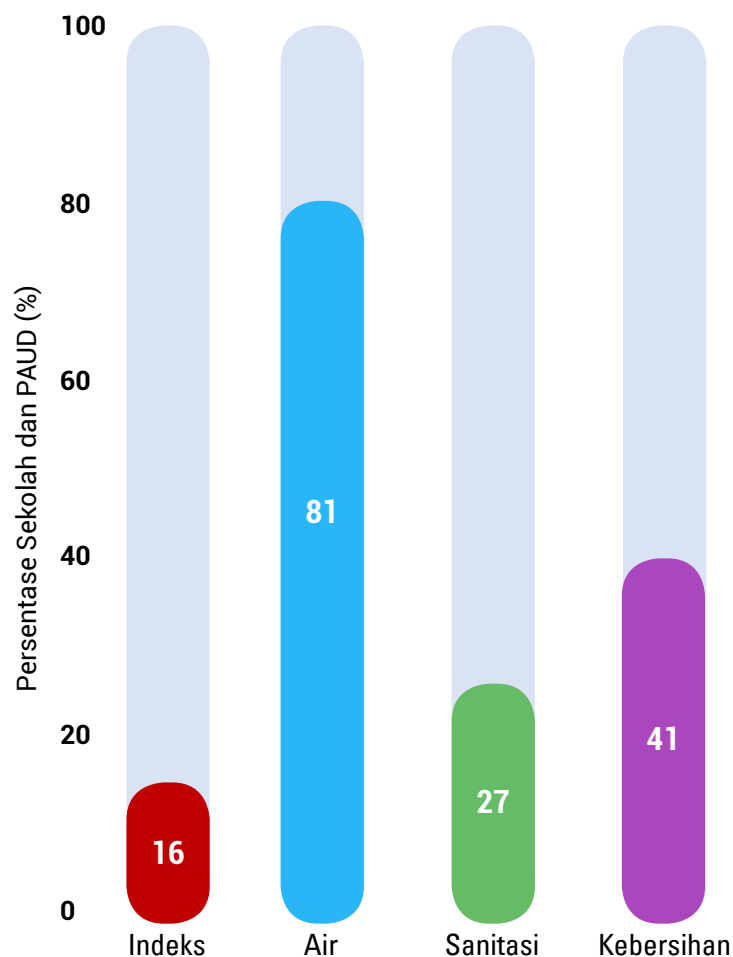


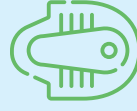
5

GAMBARAN KONDISI SANITASI SEKOLAH 2020



5.1 GAMBARAN UMUM SEMUA JENJANG



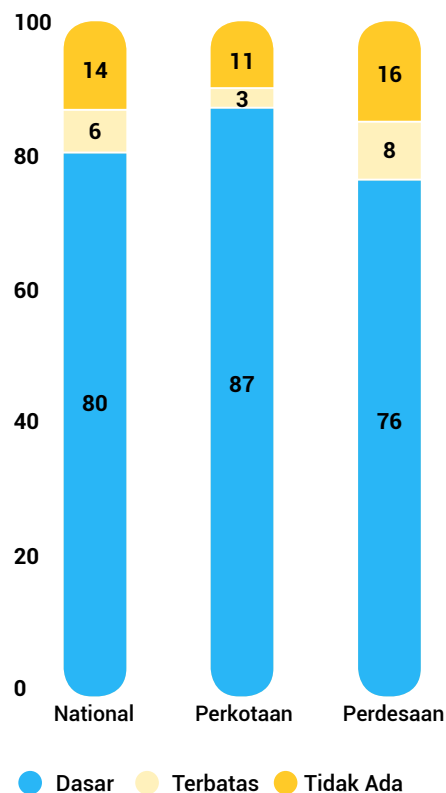
Jenis Akses Sarana	Jumlah Peserta Didik Tanpa Akses Dasar	Jumlah Sekolah Tanpa Akses Dasar
 Air	10 Juta (Peserta Didik tanpa akses air dasar)	82,575 (Sekolah tanpa akses air dasar)
 Sanitasi	37,7 juta (Peserta Didik tanpa akses sanitasi dasar)	309,783 (Sekolah tanpa akses sanitasi dasar)
 Kebersihan	10 juta (Peserta Didik tanpa akses kebersihan dasar)	251,308 (Sekolah tanpa akses kebersihan dasar)
 Air, Sanitasi dan Kebersihan	43,5 juta (Peserta Didik tanpa akses air dasar, sanitasi dasar, kebersihan dasar)	356,388 (sekolah tanpa akses air dasar, sanitasi dasar, kebersihan dasar)

Tabel : Akses Air, Sanitasi dan Kebersihan Semua Jenjang

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Air			Sanitasi			Kebersihan		
		Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
1	Prov. Aceh	75.44	5.97	18.59	20.18	36.83	43.00	31.12	24.12	44.76
2	Prov. Bali	84.27	1.42	14.31	39.31	36.10	24.60	60.20	23.95	15.85
3	Prov. Banten	83.95	2.80	13.25	32.24	38.57	29.19	45.44	26.72	27.84
4	Prov. Bengkulu	81.73	2.65	15.62	20.60	39.63	39.77	39.67	26.46	33.87
5	Prov. D.I.Yogyakarta	94.34	1.93	3.73	28.66	26.57	44.77	58.54	30.48	10.98
6	Prov. D.K.I. Jakarta	95.05	0.38	4.56	48.74	33.51	17.75	57.32	32.05	10.64
7	Prov. Gorontalo	70.44	8.31	21.25	21.41	46.09	32.50	37.19	25.16	37.65
8	Prov. Jambi	78.45	3.55	18.00	21.38	39.72	38.90	37.38	31.69	30.92
9	Prov. Jawa Barat	85.32	2.94	11.73	27.96	36.72	35.33	41.12	27.26	31.61
10	Prov. JawaTengah	91.16	1.87	6.97	30.44	35.53	34.03	44.55	39.60	15.85
11	Prov. JawaTimur	88.32	2.29	9.39	23.34	38.15	38.51	41.28	35.37	23.35
12	Prov. Kalimantan Barat	60.85	3.14	36.02	32.61	43.27	24.11	33.34	31.15	35.51
13	Prov. Kalimantan Selatan	77.50	2.34	20.16	26.85	48.61	24.55	52.51	31.13	16.36
14	Prov. KalimantanTengah	59.43	2.77	37.80	22.83	44.49	32.67	33.02	26.47	40.51
15	Prov. KalimantanTimur	74.05	2.50	23.45	37.63	42.56	19.81	43.26	34.31	22.43
16	Prov. Kalimantan Utara	64.95	4.58	30.47	30.84	50.40	18.76	34.91	32.80	32.29
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	87.16	3.21	9.63	39.56	21.84	38.60	59.20	29.98	10.82
18	Prov. Kepulauan Riau	80.61	2.86	16.52	43.17	29.64	27.19	60.03	21.50	18.47
19	Prov. Lampung	85.91	1.97	12.12	24.94	33.17	41.89	39.38	38.42	22.20
20	Prov. Maluku	60.99	5.64	33.37	15.38	44.78	39.84	37.03	29.58	33.39
21	Prov. Maluku Utara	73.18	3.17	23.65	14.52	52.26	33.22	37.40	30.65	31.95
22	Prov. NusaTenggara Barat	79.86	4.87	15.27	20.41	38.85	40.73	42.42	28.32	29.26
23	Prov. NusaTenggaraTimur	47.35	9.16	43.49	20.83	44.27	34.90	34.42	34.55	31.03
24	Prov. Papua	47.68	3.81	48.51	18.87	33.87	47.26	20.97	23.47	55.57
25	Prov. Papua Barat	52.45	2.99	44.56	21.33	37.03	41.64	30.27	23.84	45.89
26	Prov. Riau	76.93	3.32	19.75	30.42	30.38	39.20	35.50	31.01	33.50
27	Prov. Sulawesi Barat	68.39	4.94	26.67	12.15	41.89	45.96	27.06	30.08	42.87
28	Prov. Sulawesi Selatan	78.18	5.38	16.44	24.01	44.53	31.46	40.23	34.95	24.82
29	Prov. SulawesiTengah	72.84	4.02	23.14	19.10	51.32	29.58	33.08	25.18	41.74
30	Prov. SulawesiTenggara	68.48	7.24	24.28	18.80	47.73	33.46	31.81	26.82	41.37
31	Prov. Sulawesi Utara	76.72	2.26	21.02	23.21	46.66	30.13	42.52	22.91	34.57
32	Prov. Sumatera Barat	79.32	3.95	16.73	28.19	38.61	33.20	36.67	26.72	36.61
33	Prov. Sumatera Selatan	78.17	2.81	19.02	30.06	34.63	35.31	39.89	30.24	29.87
34	Prov. Sumatera Utara	74.73	2.78	22.49	30.60	35.05	34.35	34.03	22.47	43.51
Indonesia		80.52	3.17	16.31	26.91	38.23	34.86	40.70	31.07	28.23

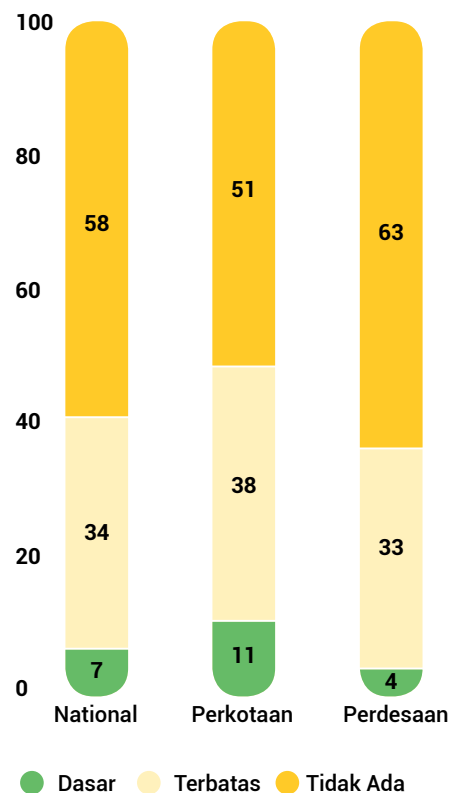


5.2 PAUD



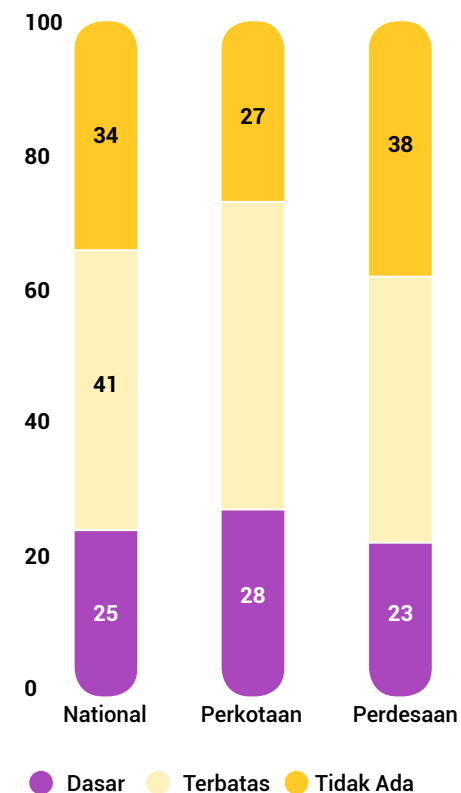
FAKTA AKSES AIR

- Satu dari lima satuan pendidikan PAUD tidak memiliki sarana air yang layak.
- Akses pada sarana air dasar pada jenjang PAUD lebih tinggi di daerah perkotaan (87%) daripada di perdesaan (76%).
- Provinsi DKI Jakarta (97%) memiliki akses dasar tertinggi pada sarana air minum untuk Jenjang SD
- Provinsi Papua (44%) memiliki akses dasar terendah pada sarana air minum



FAKTA AKSES SANITASI

- Sembilan dari sepuluh satuan pendidikan PAUD tidak memiliki sarana sanitasi yang layak.
- Akses pada sarana sanitasi dasar pada jenjang PAUD lebih tinggi di daerah perkotaan (11%) daripada di perdesaan (4%).
- Provinsi Kepulauan Riau (19%) memiliki akses tertinggi pada sarana sanitasi dasar
- Provinsi Sulawesi Barat (0,98%) memiliki akses terendah pada sarana sanitasi dasar



FAKTA AKSES KEBERSIHAN

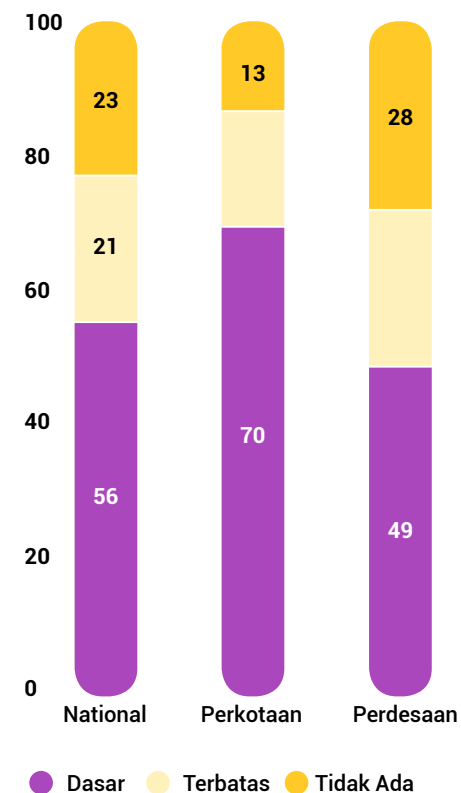
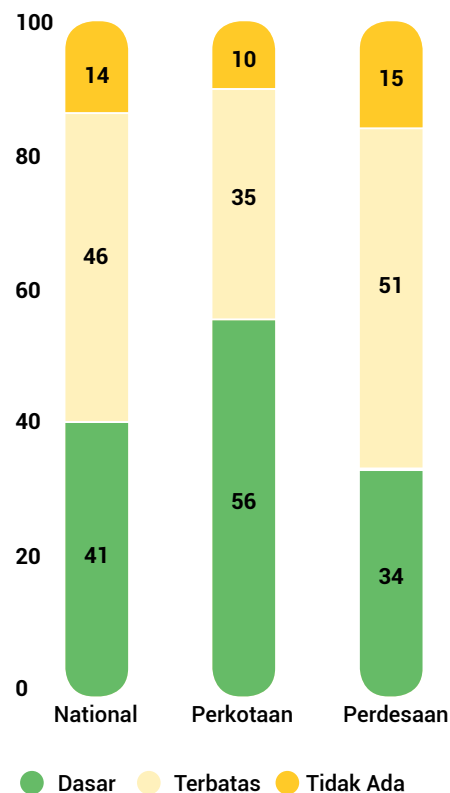
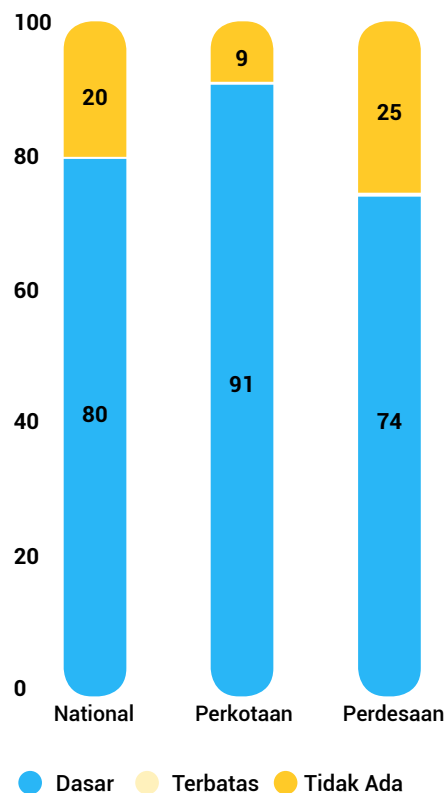
- Tiga dari empat satuan pendidikan PAUD tidak memiliki sarana cuci tangan pakai sabun yang layak.
- Akses pada sarana kebersihan dasar pada jenjang PAUD lebih tinggi di daerah perkotaan (28%) daripada di perdesaan (23%).
- Provinsi Kepulauan Riau (52%) memiliki akses dasar tertinggi pada sarana kebersihan
- Provinsi Papua (12%) memiliki akses dasar terendah pada sarana kebersihan

Tabel : Akses Air, Sanitasi dan Kebersihan Jenjang PAUD

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Air			Sanitasi			Kebersihan		
		Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
1	Prov. Aceh	70.31	12.21	17.48	3.14	23.89	72.97	23.81	25.86	50.34
2	Prov. Bali	80.60	2.86	16.55	14.33	44.12	41.55	35.95	35.23	28.82
3	Prov. Banten	78.19	5.94	15.86	9.89	39.92	50.19	25.99	36.28	37.73
4	Prov. Bengkulu	82.87	5.20	11.93	4.91	27.88	67.21	37.75	30.09	32.16
5	Prov. D.I. Yogyakarta	94.88	2.89	2.23	4.59	28.72	66.69	44.40	40.88	14.72
6	Prov. D.K.I. Jakarta	96.59	0.58	2.83	18.73	50.73	30.54	27.08	57.02	15.90
7	Prov. Gorontalo	60.73	15.23	24.05	1.21	50.33	48.46	27.31	25.92	46.77
8	Prov. Jambi	77.85	6.99	15.16	3.99	30.88	65.13	23.81	38.52	37.68
9	Prov. Jawa Barat	82.41	5.83	11.76	7.10	31.13	61.77	26.76	35.04	38.20
10	Prov. Jawa Tengah	90.91	3.40	5.69	8.26	34.22	57.52	19.52	57.75	22.74
11	Prov. Jawa Timur	88.66	3.82	7.52	7.14	35.52	57.34	24.05	46.74	29.21
12	Prov. Kalimantan Barat	65.77	9.65	24.58	11.11	42.96	45.93	17.35	46.91	35.73
13	Prov. Kalimantan Selatan	78.73	4.41	16.86	8.98	54.49	36.52	41.03	38.32	20.65
14	Prov. Kalimantan Tengah	56.54	6.17	37.29	5.35	39.16	55.49	16.27	34.04	49.69
15	Prov. Kalimantan Timur	76.48	4.95	18.57	14.68	55.99	29.33	25.20	47.83	26.98
16	Prov. Kalimantan Utara	71.38	9.32	19.29	11.09	60.45	28.46	22.67	46.30	31.03
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	84.67	7.28	8.04	7.39	19.67	72.93	41.74	43.70	14.57
18	Prov. Kepulauan Riau	79.15	5.94	14.92	19.71	33.94	46.35	51.60	21.61	26.79
19	Prov. Lampung	86.37	4.31	9.32	3.81	15.51	80.68	22.79	47.77	29.44
20	Prov. Maluku	53.55	14.60	31.85	2.54	34.56	62.90	24.35	25.91	49.74
21	Prov. Maluku Utara	73.90	8.01	18.09	2.23	37.72	60.05	24.25	33.80	41.96
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	73.62	9.72	16.66	3.46	34.73	61.81	27.37	33.23	39.39
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	46.31	21.89	31.80	4.36	33.32	62.32	21.10	38.67	40.23
24	Prov. Papua	44.07	12.58	43.35	6.59	25.10	68.31	11.99	33.66	54.35
25	Prov. Papua Barat	51.71	7.59	40.70	4.29	27.17	68.54	25.63	23.10	51.27
26	Prov. Riau	75.29	7.03	17.68	6.17	22.15	71.68	18.27	40.68	41.05
27	Prov. Sulawesi Barat	63.84	10.68	25.48	0.98	24.80	74.22	15.35	30.63	54.02
28	Prov. Sulawesi Selatan	71.56	12.57	15.87	4.67	37.19	58.14	23.29	42.90	33.81
29	Prov. Sulawesi Tengah	70.02	8.84	21.14	2.64	51.88	45.47	21.93	28.04	50.03
30	Prov. Sulawesi Tenggara	60.99	17.18	21.83	2.19	38.73	59.08	18.08	30.28	51.64
31	Prov. Sulawesi Utara	69.52	4.92	25.56	3.20	43.01	53.79	28.44	22.51	49.05
32	Prov. Sumatera Barat	75.67	8.21	16.12	7.81	36.56	55.63	30.42	31.94	37.65
33	Prov. Sumatera Selatan	74.80	6.20	18.99	6.42	28.83	64.75	25.14	37.11	37.75
34	Prov. Sumatera Utara	70.94	7.00	22.06	8.37	29.75	61.88	22.88	30.01	47.11
Indonesia		79.88	6.39	13.73	7.03	34.48	58.49	24.87	41.13	34.00



5.3 SEKOLAH DASAR



FAKTA AKSES AIR

- Satu dari lima satuan pendidikan Sekolah Dasar tidak memiliki sarana air yang layak.
- Akses dasar pada sarana air pada jenjang Sekolah Dasar jauh lebih tinggi di daerah perkotaan (91%) daripada di perdesaan (74%).
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki akses dasar tertinggi pada sarana air minum
- Provinsi Papua memiliki akses dasar terendah pada sarana air minum

FAKTA AKSES SANITASI

- Enam dari sepuluh satuan pendidikan Sekolah Dasar tidak memiliki sarana sanitasi yang layak.
- Akses pada sarana sanitasi dasar pada jenjang Sekolah Dasar lebih tinggi di daerah perkotaan (56%) daripada di perdesaan (34%).
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki akses tertinggi pada sarana sanitasi dasar
- Provinsi Sulawesi Barat memiliki akses terendah pada sarana sanitasi dasar

FAKTA AKSES KEBERSIHAN

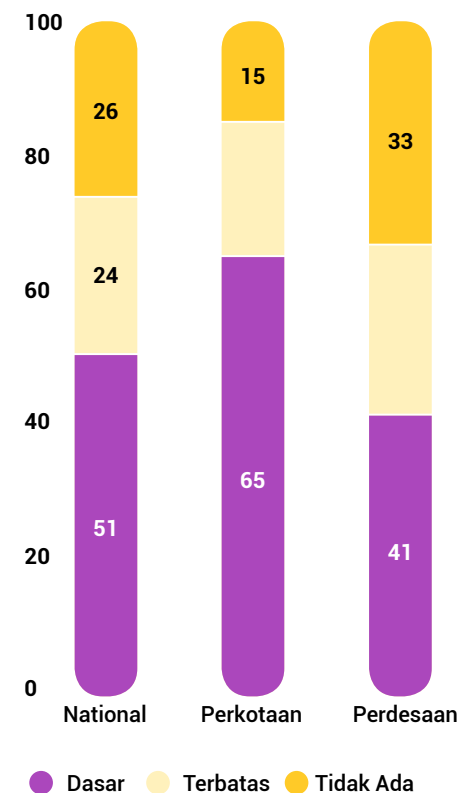
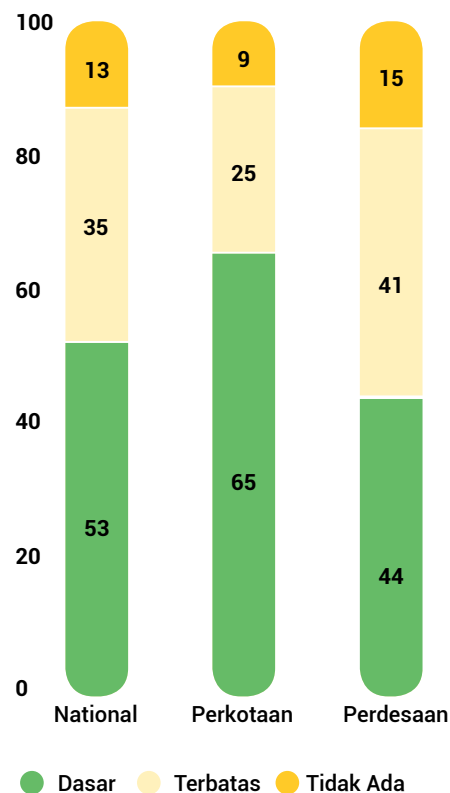
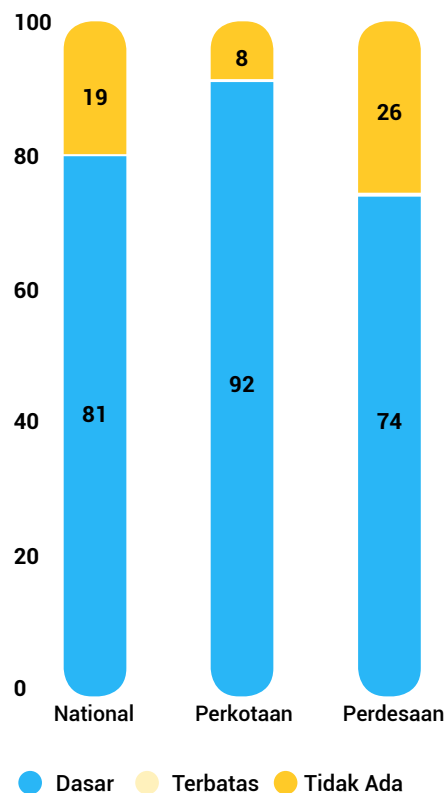
- Satu dari dua Sekolah Dasar tidak memiliki sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
- Akses pada sarana kebersihan dasar pada jenjang Sekolah Dasar lebih tinggi di daerah perkotaan (70%) daripada di perdesaan (49%).
- Provinsi DI Yogyakarta memiliki akses dasar tertinggi pada sarana kebersihan
- Provinsi Papua memiliki akses dasar terendah pada sarana kebersihan

Tabel : Akses Air, Sanitasi dan Kebersihan Jenjang Sekolah Dasar

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Air			Sanitasi			Kebersihan		
		Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
1	Prov. Aceh	79.07	0.37	20.56	31.62	51.46	16.92	38.17	23.08	38.75
2	Prov. Bali	86.58	0.33	13.09	56.44	32.30	11.26	80.26	14.76	4.98
3	Prov. Banten	86.79	0.22	12.99	45.90	41.37	12.73	61.59	16.75	21.67
4	Prov. Bengkulu	78.39	0.22	21.40	30.98	55.19	13.83	42.22	20.75	37.03
5	Prov. D.I. Yogyakarta	92.95	0.22	6.83	73.59	22.07	4.34	88.29	9.11	2.60
6	Prov. D.K.I. Jakarta	92.91	0.29	6.80	72.92	19.94	7.13	85.77	9.01	5.21
7	Prov. Gorontalo	80.93	0.21	18.86	41.42	44.39	14.19	50.95	24.58	24.47
8	Prov. Jambi	77.11	0.16	22.73	33.65	54.17	12.18	52.37	23.22	24.41
9	Prov. Jawa Barat	86.49	0.23	13.28	41.72	47.54	10.75	52.46	18.93	28.61
10	Prov. Jawa Tengah	90.78	0.19	9.03	52.06	39.97	7.97	75.16	17.63	7.21
11	Prov. Jawa Timur	86.67	0.21	13.12	41.37	45.66	12.97	65.53	19.87	14.61
12	Prov. Kalimantan Barat	55.26	0.11	44.62	36.71	47.83	15.45	38.91	23.77	37.32
13	Prov. Kalimantan Selatan	74.82	0.14	25.04	41.12	46.81	12.06	64.53	23.54	11.93
14	Prov. Kalimantan Tengah	59.29	0.08	40.64	30.87	53.65	15.47	46.46	20.47	33.07
15	Prov. Kalimantan Timur	69.04	0.26	30.70	56.03	33.28	10.69	61.56	21.27	17.17
16	Prov. Kalimantan Utara	57.74	0.84	41.42	41.63	47.28	11.09	46.23	20.71	33.05
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	89.46	0.00	10.54	63.97	24.39	11.64	76.59	17.16	6.25
18	Prov. Kepulauan Riau	82.33	0.42	17.26	58.94	28.69	12.37	71.21	19.02	9.77
19	Prov. Lampung	83.84	0.08	16.07	37.07	52.57	10.36	53.65	30.49	15.86
20	Prov. Maluku	66.33	0.11	33.56	19.32	53.71	26.97	46.68	32.55	20.77
21	Prov. Maluku Utara	73.88	0.23	25.89	17.06	65.50	17.44	46.53	28.33	25.13
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	86.97	0.19	12.85	35.15	45.58	19.27	59.17	22.59	18.24
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	46.20	0.58	53.22	26.99	56.75	16.26	46.12	32.33	21.55
24	Prov. Papua	45.59	0.19	54.22	17.63	37.86	44.51	22.82	17.98	59.20
25	Prov. Papua Barat	47.81	0.37	51.82	24.93	45.85	29.23	31.19	22.78	46.03
26	Prov. Riau	76.47	0.27	23.26	46.55	40.89	12.56	51.01	21.97	27.02
27	Prov. Sulawesi Barat	69.45	0.15	30.40	15.20	59.74	25.06	36.64	28.74	34.61
28	Prov. Sulawesi Selatan	81.22	0.28	18.50	32.65	54.34	13.01	53.69	29.34	16.97
29	Prov. Sulawesi Tengah	73.03	0.24	26.73	26.11	55.52	18.37	42.00	23.87	34.12
30	Prov. Sulawesi Tenggara	72.50	0.17	27.33	25.99	58.15	15.86	40.99	24.31	34.70
31	Prov. Sulawesi Utara	82.07	0.09	17.84	34.62	54.56	10.82	53.00	23.17	23.84
32	Prov. Sumatera Barat	81.27	0.19	18.54	42.38	43.11	14.51	40.63	22.63	36.74
33	Prov. Sumatera Selatan	79.12	0.15	20.73	44.76	42.82	12.42	52.57	24.50	22.92
34	Prov. Sumatera Utara	74.05	0.24	25.72	38.99	42.48	18.54	38.60	18.19	43.21
Indonesia		79.68	0.22	20.09	40.80	45.60	13.60	55.83	21.23	22.94



5.4 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



FAKTA AKSES AIR

- Satu dari lima satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak memiliki sarana air yang layak.
- Akses pada sarana air dasar pada jenjang SMP lebih tinggi di daerah perkotaan (92%) daripada di perdesaan (74%).
- Provinsi DKI Jakarta memiliki akses dasar tertinggi pada sarana air minum
- Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki akses dasar terendah pada sarana air minum

FAKTA AKSES SANITASI

- Satu dari dua satuan pendidikan SMP tidak memiliki sarana sanitasi yang layak.
- Akses pada sarana sanitasi dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama lebih tinggi di daerah perkotaan (66%) daripada di perdesaan (44%).
- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki akses tertinggi pada sarana sanitasi dasar
- Provinsi Maluku Utara memiliki akses terendah pada sarana sanitasi dasar

FAKTA AKSES KEBERSIHAN

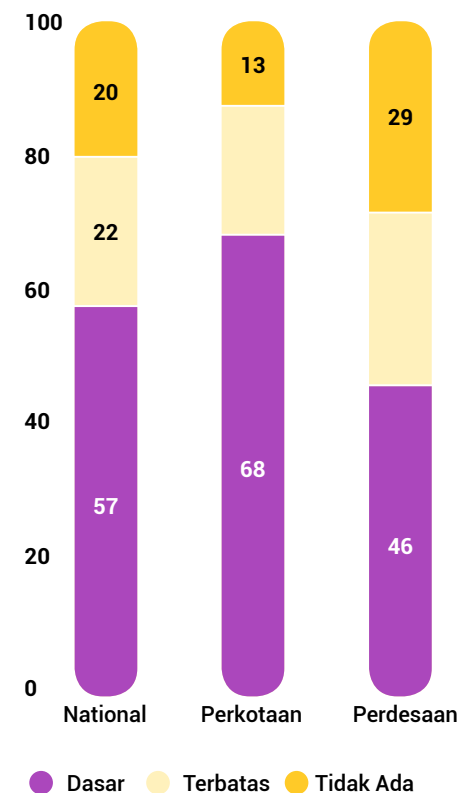
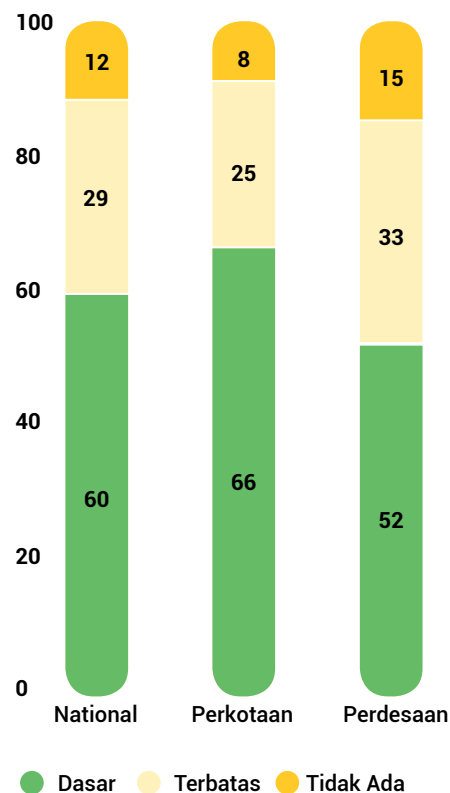
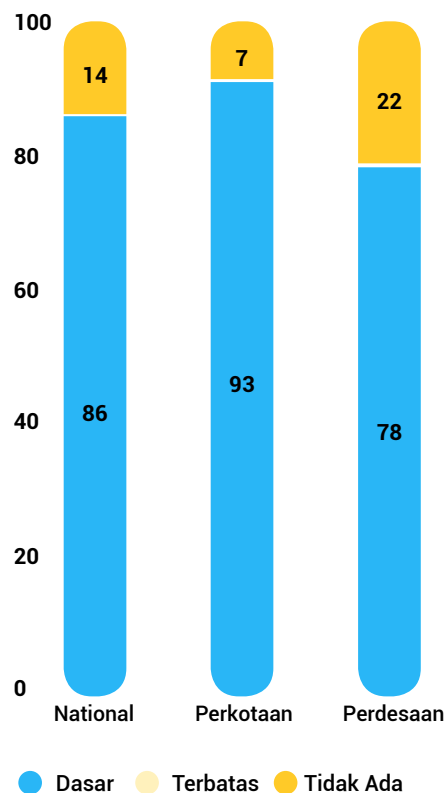
- Satu dari dua SMP tidak memiliki sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
- Akses pada sarana kebersihan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama lebih tinggi di daerah perkotaan (65%) daripada di perdesaan (41%).
- Provinsi DKI Jakarta memiliki akses dasar tertinggi pada sarana kebersihan
- Provinsi Papua Barat memiliki akses dasar terendah pada sarana kebersihan

Tabel : Akses Air, Sanitasi dan Kebersihan Jenjang Sekolah Menengah Pertama

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Air			Sanitasi			Kebersihan		
		Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
1	Prov. Aceh	80.44	0.09	19.47	38.68	46.46	14.86	34.76	20.58	44.66
2	Prov. Bali	87.20	0.24	12.56	66.59	19.91	13.51	74.88	15.88	9.24
3	Prov. Banten	91.21	0.07	8.73	59.09	30.65	10.26	60.03	21.12	18.85
4	Prov. Bengkulu	81.73	0.00	18.27	41.69	46.14	12.18	38.88	25.53	35.60
5	Prov. D.I.Yogyakarta	92.78	0.23	7.00	74.94	19.19	5.87	74.27	17.61	8.13
6	Prov. D.K.I. Jakarta	95.07	0.19	4.75	79.05	14.43	6.52	79.42	13.50	7.08
7	Prov. Gorontalo	81.66	0.00	18.34	47.04	37.87	15.09	41.42	23.08	35.50
8	Prov. Jambi	80.71	0.00	19.29	43.30	40.65	16.05	45.80	27.39	26.80
9	Prov. Jawa Barat	89.37	0.15	10.48	59.05	31.35	9.60	55.03	22.23	22.74
10	Prov. Jawa Tengah	92.58	0.06	7.36	64.55	27.64	7.80	61.57	26.60	11.83
11	Prov. Jawa Timur	89.13	0.15	10.72	55.04	32.34	12.63	60.14	20.00	19.86
12	Prov. Kalimantan Barat	61.98	0.45	37.57	52.15	36.43	11.41	39.98	25.25	34.77
13	Prov. Kalimantan Selatan	74.43	0.16	25.41	54.40	33.55	12.05	62.87	23.62	13.52
14	Prov. Kalimantan Tengah	63.28	0.12	36.60	44.86	41.39	13.76	43.30	20.22	36.48
15	Prov. Kalimantan Timur	71.84	0.15	28.01	64.69	22.68	12.63	56.62	21.92	21.46
16	Prov. Kalimantan Utara	60.56	0.56	38.89	57.22	32.22	10.56	36.67	27.78	35.56
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	87.44	0.00	12.56	66.51	21.86	11.63	62.79	22.79	14.42
18	Prov. Kepulauan Riau	80.05	0.52	19.42	66.14	22.05	11.81	61.94	23.88	14.17
19	Prov. Lampung	86.39	0.00	13.61	47.57	41.71	10.72	48.44	31.28	20.28
20	Prov. Maluku	61.40	0.46	38.15	28.57	46.50	24.92	37.99	32.83	29.18
21	Prov. Maluku Utara	72.62	0.20	27.18	25.96	56.59	17.44	40.77	32.05	27.18
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	80.27	0.21	19.52	36.95	37.79	25.26	48.12	26.10	25.78
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	47.79	0.23	51.98	39.12	45.09	15.80	36.53	31.71	31.76
24	Prov. Papua	52.47	0.14	47.39	35.83	35.97	28.21	25.25	21.86	52.89
25	Prov. Papua Barat	59.35	0.00	40.65	40.00	39.35	20.65	33.55	26.77	39.68
26	Prov. Riau	79.52	0.17	20.32	55.43	31.44	13.13	45.74	24.50	29.77
27	Prov. Sulawesi Barat	75.60	0.27	24.13	34.32	49.06	16.62	37.27	30.29	32.44
28	Prov. Sulawesi Selatan	83.81	0.06	16.13	47.32	41.13	11.55	47.14	29.35	23.51
29	Prov. Sulawesi Tengah	78.28	0.35	21.37	42.27	43.57	14.17	39.08	21.96	38.96
30	Prov. Sulawesi Tenggara	73.86	0.52	25.62	37.91	47.19	14.90	40.13	24.84	35.03
31	Prov. Sulawesi Utara	81.49	0.28	18.23	45.99	43.78	10.22	53.18	25.00	21.82
32	Prov. Sumatera Barat	83.19	0.73	16.08	56.59	30.96	12.45	39.90	22.25	37.85
33	Prov. Sumatera Selatan	81.19	0.15	18.66	50.70	36.37	12.93	44.45	26.01	29.54
34	Prov. Sumatera Utara	80.08	0.15	19.77	52.53	30.25	17.22	41.94	16.88	41.18
Indonesia		81.17	0.18	18.66	52.50	34.60	12.90	50.59	23.57	25.84



5.5 SEKOLAH MENENGAH ATAS



FAKTA AKSES AIR

- 14% Pendidikan Sekolah Atas Pertama tidak memiliki sarana air yang layak.
- Akses pada sarana air dasar pada jenjang SMA lebih tinggi di daerah perkotaan (93%) daripada di perdesaan (78%).
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki akses dasar tertinggi pada sarana air minum
- Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki akses dasar terendah pada sarana air minum

FAKTA AKSES SANITASI

- Dua dari lima satuan pendidikan SMA tidak memiliki sarana sanitasi yang layak.
- Akses pada sarana sanitasi dasar pada jenjang Sekolah Dasar lebih tinggi di daerah perkotaan (66%) daripada di perdesaan (44%).
- Provinsi DKI Jakarta memiliki akses tertinggi pada sarana sanitasi dasar
- Provinsi Maluku memiliki akses terendah pada sarana sanitasi dasar

FAKTA AKSES KEBERSIHAN

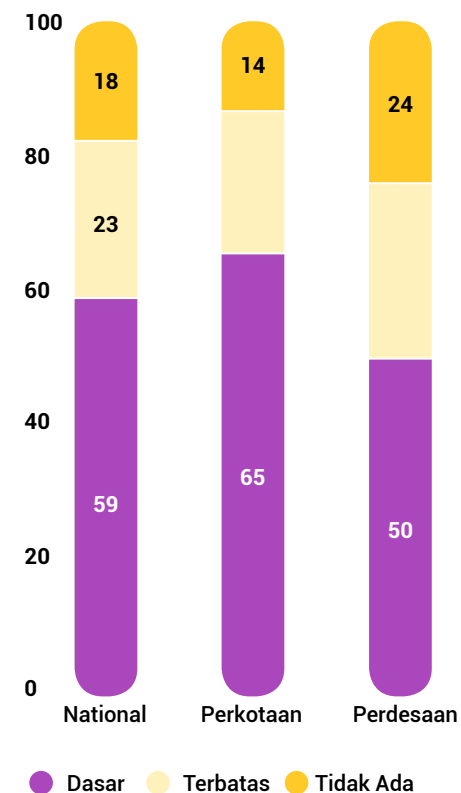
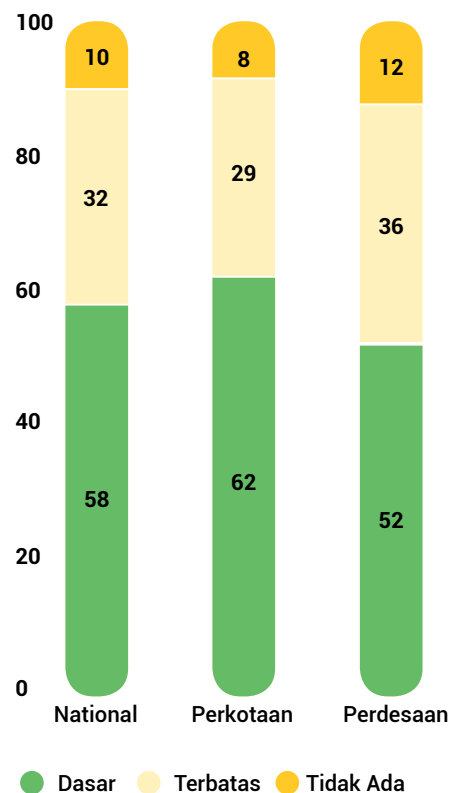
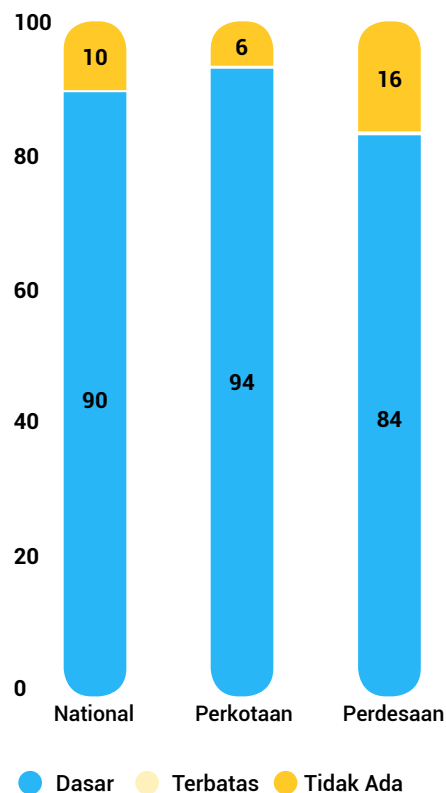
- Dua dari lima SMA tidak memiliki sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
- Akses pada sarana kebersihan dasar pada jenjang Sekolah SMA lebih tinggi di daerah perkotaan (68%) daripada di perdesaan (46%).
- Provinsi DKI Jakarta memiliki akses dasar tertinggi pada sarana kebersihan
- Provinsi Papua memiliki akses dasar terendah pada sarana kebersihan

Tabel : Akses Air, Sanitasi dan Kebersihan Jenjang Sekolah Menengah Atas

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Air			Sanitasi			Kebersihan		
		Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
1	Prov. Aceh	83.27	0.00	16.73	49.81	38.35	11.84	40.23	23.12	36.65
2	Prov. Bali	90.68	0.00	9.32	62.73	19.88	17.39	75.16	15.53	9.32
3	Prov. Banten	91.94	0.35	7.71	63.57	25.92	10.51	64.27	22.42	13.31
4	Prov. Bengkulu	89.51	0.00	10.49	53.85	39.16	6.99	45.45	29.37	25.17
5	Prov. D.I.Yogyakarta	95.71	0.00	4.29	74.23	20.86	4.91	81.60	13.50	4.91
6	Prov. D.K.I. Jakarta	93.70	0.00	6.30	82.52	12.60	4.88	86.99	7.93	5.08
7	Prov. Gorontalo	93.94	0.00	6.06	69.70	19.70	10.61	50.00	24.24	25.76
8	Prov. Jambi	85.53	0.00	14.47	61.28	28.51	10.21	50.21	31.91	17.87
9	Prov. Jawa Barat	92.36	0.00	7.64	65.00	26.94	8.06	64.40	20.81	14.79
10	Prov. Jawa Tengah	95.62	0.00	4.38	68.17	25.37	6.46	69.78	21.57	8.65
11	Prov. Jawa Timur	91.37	0.13	8.50	57.85	29.12	13.04	67.64	18.22	14.14
12	Prov. Kalimantan Barat	72.34	0.00	27.66	56.46	30.16	13.38	51.47	24.26	24.26
13	Prov. Kalimantan Selatan	90.77	0.51	8.72	67.18	18.97	13.85	72.82	20.51	6.67
14	Prov. Kalimantan Tengah	73.75	0.42	25.83	57.92	26.25	15.83	47.50	20.00	32.50
15	Prov. Kalimantan Timur	82.38	0.44	17.18	65.20	24.67	10.13	58.15	20.70	21.15
16	Prov. Kalimantan Utara	68.85	0.00	31.15	59.02	31.15	9.84	55.74	11.48	32.79
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	90.00	0.00	10.00	74.29	17.14	8.57	71.43	21.43	7.14
18	Prov. Kepulauan Riau	82.43	0.00	17.57	73.65	18.24	8.11	64.86	22.30	12.84
19	Prov. Lampung	90.85	0.00	9.15	60.04	31.41	8.55	54.47	32.01	13.52
20	Prov. Maluku	69.15	0.35	30.50	29.79	46.45	23.76	46.81	25.18	28.01
21	Prov. Maluku Utara	68.27	0.48	31.25	37.02	45.67	17.31	50.48	25.96	23.56
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	89.19	0.00	10.81	48.35	33.03	18.62	58.86	26.43	14.71
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	57.69	0.00	42.31	50.09	32.91	17.00	41.23	25.86	32.91
24	Prov. Papua	64.29	0.42	35.29	47.90	33.61	18.49	32.77	22.69	44.54
25	Prov. Papua Barat	69.67	0.82	29.51	56.56	27.05	16.39	44.26	30.33	25.41
26	Prov. Riau	82.41	0.22	17.37	62.36	29.40	8.24	44.99	27.62	27.39
27	Prov. Sulawesi Barat	82.95	0.00	17.05	45.45	37.50	17.05	38.64	28.41	32.95
28	Prov. Sulawesi Selatan	90.50	0.00	9.50	57.51	33.33	9.15	55.09	26.60	18.31
29	Prov. Sulawesi Tengah	83.04	0.00	16.96	58.04	28.13	13.84	42.86	18.75	38.39
30	Prov. Sulawesi Tenggara	80.47	0.00	19.53	43.77	41.08	15.15	44.11	24.24	31.65
31	Prov. Sulawesi Utara	88.84	0.00	11.16	54.91	33.48	11.61	61.16	21.88	16.96
32	Prov. Sumatera Barat	88.25	0.30	11.45	62.35	27.11	10.54	54.22	21.39	24.40
33	Prov. Sumatera Selatan	87.21	0.34	12.46	64.48	24.58	10.94	55.39	23.57	21.04
34	Prov. Sumatera Utara	85.57	0.09	14.34	58.27	27.94	13.79	47.98	19.39	32.63
Indonesia		85.88	0.11	14.00	59.54	28.91	11.55	57.50	22.09	20.41



5.6 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



FAKTA AKSES AIR

- Satu dari sepuluh satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan tidak memiliki sarana air yang layak.
- Akses pada sarana air dasar pada jenjang SMK lebih tinggi di daerah perkotaan (94%) daripada di perdesaan (84%).
- Provinsi Jawa Tengah memiliki akses dasar tertinggi pada sarana air minum
- Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki akses dasar terendah pada sarana air minum

FAKTA AKSES SANITASI

- Dua dari lima satuan pendidikan SMK tidak memiliki sarana sanitasi yang layak.
- Akses pada sarana sanitasi dasar pada jenjang SMK lebih tinggi di daerah perkotaan (62%) daripada di perdesaan (52%)
- Provinsi DKI Jakarta memiliki akses tertinggi pada sarana sanitasi dasar
- Provinsi Maluku Utara memiliki akses terendah pada sarana sanitasi dasar

FAKTA AKSES KEBERSIHAN

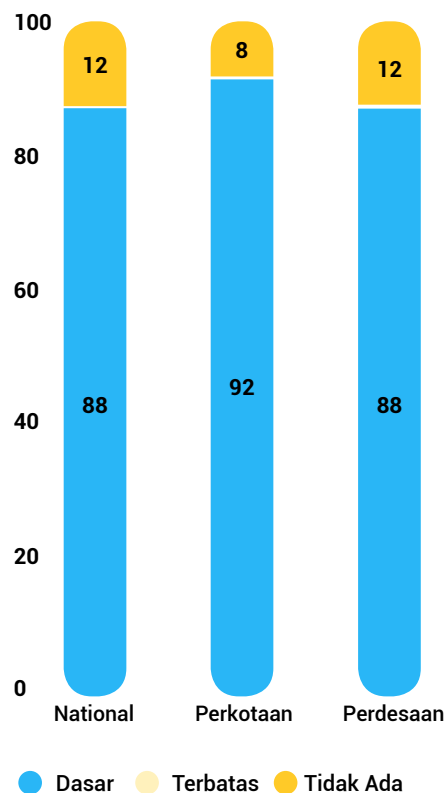
- Dua dari lima SMK tidak memiliki sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
- Akses pada sarana kebersihan dasar pada jenjang SMK lebih tinggi di daerah perkotaan (65%) daripada di perdesaan (41%)
- Provinsi DKI Jakarta memiliki akses dasar tertinggi pada sarana kebersihan
- Provinsi Sulawesi memiliki akses dasar terendah pada sarana kebersihan

Tabel : Akses Air, Sanitasi dan Kebersihan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Air			Sanitasi			Kebersihan		
		Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
1	Prov. Aceh	85.25	0.00	14.75	52.07	40.09	7.83	38.25	23.50	38.25
2	Prov. Bali	91.28	0.58	8.14	63.37	30.81	5.81	74.42	19.19	6.40
3	Prov. Banten	93.43	0.00	6.57	57.73	33.11	9.17	61.42	24.90	13.68
4	Prov. Bengkulu	90.38	0.00	9.62	50.96	38.46	10.58	40.38	29.81	29.81
5	Prov. D.I.Yogyakarta	94.09	0.00	5.91	65.91	30.91	3.18	73.64	18.18	8.18
6	Prov. D.K.I. Jakarta	94.39	0.17	5.44	68.37	23.81	7.82	76.70	13.95	9.35
7	Prov. Gorontalo	82.46	1.75	15.79	66.67	28.07	5.26	54.39	26.32	19.30
8	Prov. Jambi	89.89	0.00	10.11	60.11	29.78	10.11	50.56	28.65	20.79
9	Prov. Jawa Barat	93.58	0.03	6.39	59.97	32.25	7.78	62.56	22.09	15.36
10	Prov. Jawa Tengah	94.52	0.13	5.35	67.57	25.63	6.80	65.62	23.17	11.21
11	Prov. Jawa Timur	92.40	0.19	7.41	54.20	33.95	11.85	64.12	22.29	13.60
12	Prov. Kalimantan Barat	75.78	0.00	24.22	67.26	24.66	8.07	54.71	20.18	25.11
13	Prov. Kalimantan Selatan	91.20	0.80	8.00	68.00	22.40	9.60	56.00	31.20	12.80
14	Prov. Kalimantan Tengah	72.99	0.00	27.01	54.01	39.42	6.57	51.09	24.82	24.09
15	Prov. Kalimantan Timur	84.68	0.00	15.32	61.26	27.93	10.81	54.05	29.73	16.22
16	Prov. Kalimantan Utara	62.07	0.00	37.93	58.62	37.93	3.45	48.28	24.14	27.59
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	87.93	0.00	12.07	58.62	25.86	15.52	58.62	32.76	8.62
18	Prov. Kepulauan Riau	82.30	0.00	17.70	64.60	23.89	11.50	48.67	33.63	17.70
19	Prov. Lampung	93.36	0.00	6.64	58.71	34.23	7.05	57.68	30.71	11.62
20	Prov. Maluku	67.26	0.00	32.74	36.28	45.13	18.58	45.13	32.74	22.12
21	Prov. Maluku Utara	65.47	0.72	33.81	25.90	58.99	15.11	38.13	25.90	35.97
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	88.62	0.00	11.38	43.08	38.77	18.15	57.54	25.54	16.92
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	61.64	0.00	38.36	44.86	41.78	13.36	45.55	30.82	23.63
24	Prov. Papua	71.74	0.00	28.26	38.41	44.20	17.39	39.86	23.91	36.23
25	Prov. Papua Barat	74.07	0.00	25.93	46.30	37.04	16.67	38.89	24.07	37.04
26	Prov. Riau	88.63	0.00	11.37	64.88	25.42	9.70	57.19	22.74	20.07
27	Prov. Sulawesi Barat	78.83	0.00	21.17	32.12	50.36	17.52	37.23	34.31	28.47
28	Prov. Sulawesi Selatan	92.29	0.45	7.26	53.74	36.96	9.30	49.66	30.61	19.73
29	Prov. Sulawesi Tengah	81.28	0.00	18.72	45.45	38.50	16.04	46.52	20.86	32.62
30	Prov. Sulawesi Tenggara	75.93	0.00	24.07	38.89	48.15	12.96	43.83	27.78	28.40
31	Prov. Sulawesi Utara	83.96	0.00	16.04	51.34	33.69	14.97	56.68	19.25	24.06
32	Prov. Sumatera Barat	88.43	0.00	11.57	58.80	30.09	11.11	47.22	22.22	30.56
33	Prov. Sumatera Selatan	90.16	0.00	9.84	65.25	22.95	11.80	56.39	27.21	16.39
34	Prov. Sumatera Utara	88.50	0.10	11.40	56.80	29.90	13.30	50.90	15.70	33.40
Indonesia		89.65	0.10	10.24	57.80	32.22	9.97	58.94	23.22	17.84

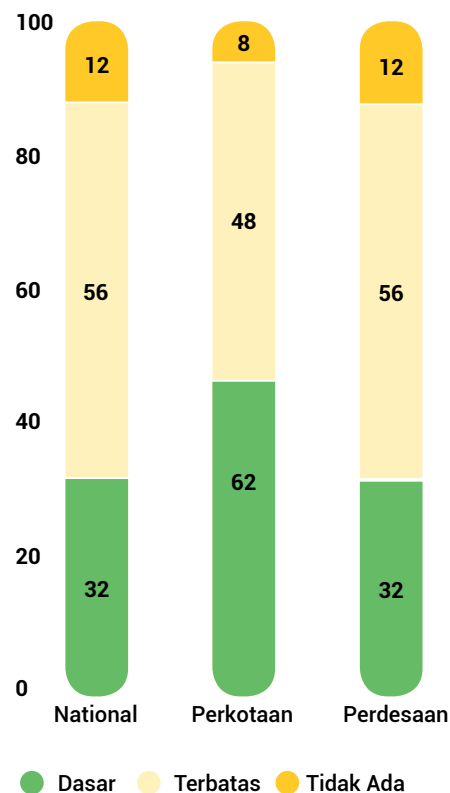


5.7 SEKOLAH LUAR BIASA



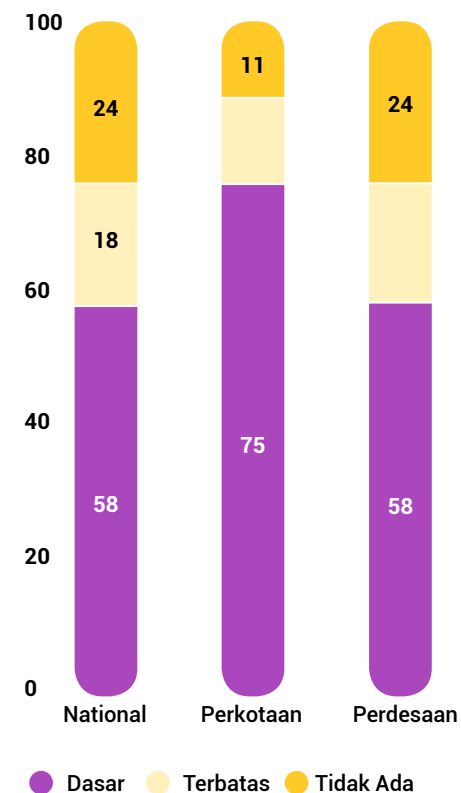
FAKTA AKSES AIR

- 12% satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa tidak memiliki sarana air yang layak.
- Akses pada sarana air dasar pada jenjang SLB lebih tinggi di daerah perkotaan (92%) daripada di perdesaan (88%).
- Provinsi-provinsi yang memiliki akses dasar tertinggi pada sarana air minum adalah adalah Prov. Bengkulu, Bangka Belitung, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sumatera Selatan



FAKTA AKSES SANITASI

- Satu dari tiga satuan pendidikan SLB tidak memiliki sarana sanitasi yang layak.
- Akses pada sarana sanitasi dasar pada jenjang SLB lebih tinggi di daerah perkotaan (47%) daripada di perdesaan (32%).
- Provinsi Bali memiliki akses tertinggi pada sarana sanitasi dasar
- Provinsi Kalimantan Utara memiliki akses terendah pada sarana sanitasi dasar



FAKTA AKSES KEBERSIHAN

- Satu dari dua SLB tidak memiliki sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
- Akses pada sarana kebersihan dasar pada jenjang SLB lebih tinggi di daerah perkotaan (75%) daripada di perdesaan (58%).
- Provinsi Bengkulu memiliki akses dasar tertinggi pada sarana kebersihan
- Provinsi DI Yogyakarta memiliki akses dasar terendah pada sarana kebersihan

Tabel : Akses Air, Sanitasi dan Kebersihan pada Sekolah Luar Biasa

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Air			Sanitasi			Kebersihan		
		Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada	Dasar	Terbatas	Tidak Ada
1	Prov. Aceh	88.31	0.00	11.69	37.66	51.95	10.39	50.65	20.78	28.57
2	Prov. Bali	84.62	0.00	15.38	84.62	15.38	0.00	61.54	30.77	7.69
3	Prov. Banten	91.00	0.00	9.00	41.00	55.00	4.00	81.00	8.00	11.00
4	Prov. Bengkulu	100.00	0.00	0.00	58.82	23.53	17.65	29.41	35.29	35.29
5	Prov. D.I.Yogyakarta	98.73	0.00	1.27	63.29	35.44	1.27	91.14	5.06	3.80
6	Prov. D.K.I. Jakarta	95.65	0.00	4.35	59.78	36.96	3.26	85.87	10.87	3.26
7	Prov. Gorontalo	87.50	0.00	12.50	37.50	62.50	0.00	50.00	25.00	25.00
8	Prov. Jambi	88.89	0.00	11.11	66.67	33.33	0.00	72.22	22.22	5.56
9	Prov. Jawa Barat	93.46	0.26	6.28	41.88	53.93	4.19	76.18	9.95	13.87
10	Prov. Jawa Tengah	92.11	0.00	7.89	45.79	51.05	3.16	74.21	16.32	9.47
11	Prov. Jawa Timur	91.58	0.22	8.21	37.37	53.13	9.50	77.54	10.80	11.66
12	Prov. Kalimantan Barat	77.27	0.00	22.73	68.18	31.82	0.00	63.64	18.18	18.18
13	Prov. Kalimantan Selatan	92.86	0.00	7.14	53.57	35.71	10.71	75.00	21.43	3.57
14	Prov. Kalimantan Tengah	87.50	0.00	12.50	62.50	33.33	4.17	75.00	16.67	8.33
15	Prov. Kalimantan Timur	71.43	0.00	28.57	42.86	51.43	5.71	82.86	8.57	8.57
16	Prov. Kalimantan Utara	80.00	0.00	20.00	0.00	60.00	40.00	80.00	0.00	20.00
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	100.00	0.00	0.00	77.78	22.22	0.00	88.89	11.11	0.00
18	Prov. Kepulauan Riau	82.35	0.00	17.65	41.18	58.82	0.00	70.59	11.76	17.65
19	Prov. Lampung	96.30	0.00	3.70	62.96	37.04	0.00	62.96	25.93	11.11
20	Prov. Maluku	64.29	0.00	35.71	21.43	50.00	28.57	64.29	14.29	21.43
21	Prov. Maluku Utara	100.00	0.00	0.00	52.63	42.11	5.26	68.42	26.32	5.26
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	86.67	0.00	13.33	28.89	57.78	13.33	75.56	2.22	22.22
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	69.44	0.00	30.56	50.00	36.11	13.89	33.33	44.44	22.22
24	Prov. Papua	70.00	0.00	30.00	40.00	50.00	10.00	60.00	20.00	20.00
25	Prov. Papua Barat	100.00	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	40.00	40.00	20.00
26	Prov. Riau	87.23	0.00	12.77	51.06	44.68	4.26	63.83	17.02	19.15
27	Prov. Sulawesi Barat	92.00	0.00	8.00	20.00	68.00	12.00	32.00	44.00	24.00
28	Prov. Sulawesi Selatan	95.35	0.00	4.65	32.56	53.49	13.95	52.33	31.40	16.28
29	Prov. Sulawesi Tengah	82.76	0.00	17.24	37.93	55.17	6.90	65.52	3.45	31.03
30	Prov. Sulawesi Tenggara	81.08	0.00	18.92	25.68	63.51	10.81	56.76	14.86	28.38
31	Prov. Sulawesi Utara	86.67	0.00	13.33	43.33	40.00	16.67	66.67	20.00	13.33
32	Prov. Sumatera Barat	91.45	0.00	8.55	30.26	59.21	10.53	60.53	11.84	27.63
33	Prov. Sumatera Selatan	100.00	0.00	0.00	50.00	47.06	2.94	55.88	32.35	11.76
34	Prov. Sumatera Utara	87.93	0.00	12.07	58.62	34.48	6.90	60.34	15.52	24.14
Indonesia		90.66	0.09	9.25	42.73	50.09	7.18	70.53	14.54	14.93

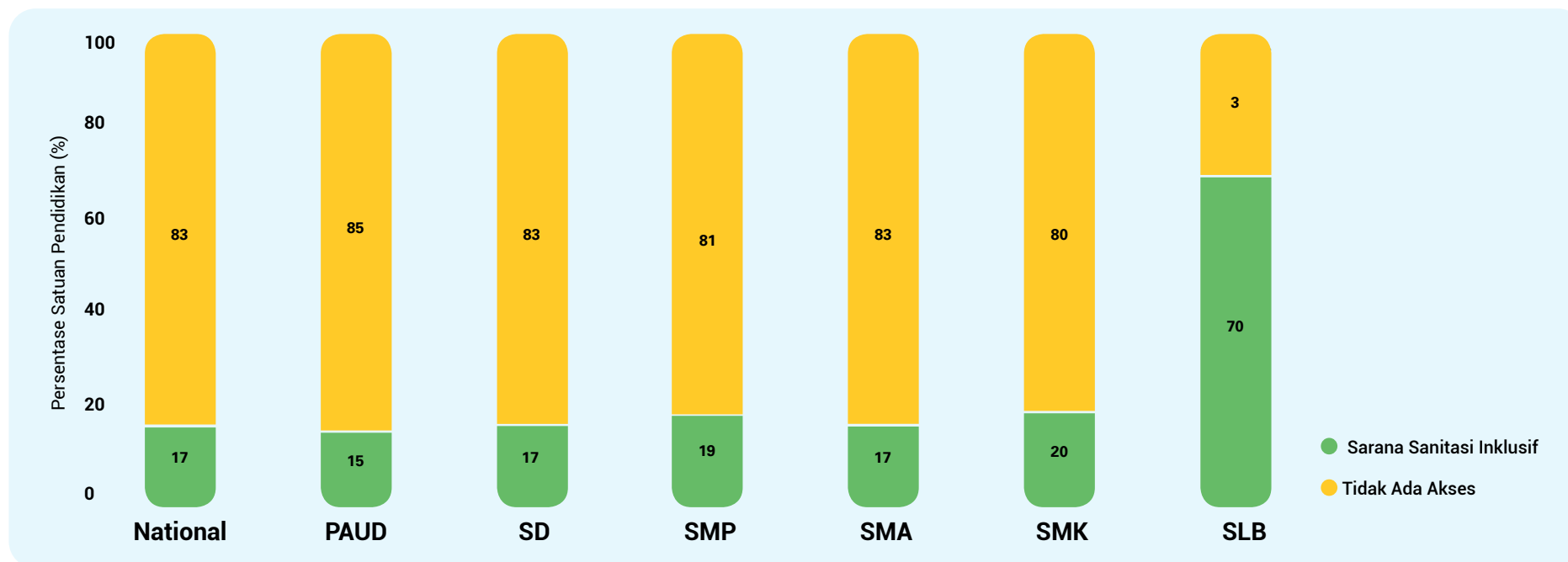


SANITASI SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK DENGAN DISABILITAS

Di Indonesia, Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah umum yang menerima anak dengan disabilitas (sekolah inklusif). Walaupun kebijakan yang ada mewajibkan sekolah untuk menerima anak dengan disabilitas, sayangnya tidak semua sekolah siap dengan fasilitas dan kapasitas sumber daya yang memadai. Dalam profil Sanitasi Sekolah 2020, dapat terlihat hanya 60% SLB yang mampu memenuhi kebutuhan penyediaan akses air, sanitasi, dan kebersihan yang aman, inklusif, dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Sedangkan rata-rata nasional hanya 17%, dengan rincian jenjang PAUD 15%, SD 17%, SMP 19%, SMA 17%, dan SMK 20% yang memiliki sarana sanitasi inklusif.

Penyediaan sarana sanitasi sekolah yang dapat diakses semua anak perlu mempertimbangkan prinsip desain universal:

1. Dapat digunakan oleh setiap orang, termasuk anak-anak
2. Fleksibilitas dalam penggunaan
3. Desain sederhana dan mudah digunakan
4. Memberikan informasi yang memadai
5. Bertoleransi terhadap kesalahan
6. Membutuhkan upaya fisik yang rendah
7. Menyediakan ukuran dan ruang memadai untuk penggunaan



6

ANALISA BIAYA MODAL DAN OPERASIONAL

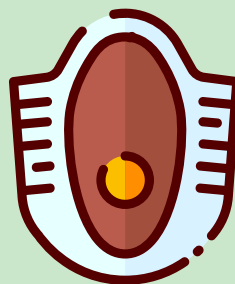


6.1 ANALISA BIAYA MODAL SANITASI SEKOLAH

Dalam rangka mencapai target SDGs diperlukan analisa pembiayaan modal dan operasional sanitasi sekolah. Analisa biaya modal dilakukan untuk mendapatkan informasi besaran dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan baru atau rehabilitasi sarana air, sanitasi dan kebersihan pada sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana yang memadai. Salah satu metode yang paling mudah dilakukan untuk mengetahui biaya modal atau investasi adalah melalui perkalian jumlah sekolah yang belum terlayani dan asumsi *unit cost* atau satuan biaya yang berbeda-beda untuk penyediaan sarana air, peyediaan sarana sanitasi dan dan penyediaan sarana cuci tangan. Satuan biaya dapat dihitung melalui berbagai pendekatan, salah satunya ialah mengambil contoh biaya dari program yang sudah pernah telaksana. Misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Dibawah ini adalah asumsi satuan biaya yang dipakai untuk analisa biaya modal. Dengan metode ini, maka total biaya investasi untuk semua jenjang di seluruh Indonesia adalah sekitar 43,7 Trilyun Rupiah. Untuk pemenuhan akses sanitasi sekolah pemerintah daerah dapat membuat perencanaan kegiatan prioritas terutama terkait sarana CTPS yang harus ada di lingkungan sekolah apabila sekolah akan melakukan tatap muka. Untuk anggaran sanitasi sekolah pemerintah daerah dapat mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerjasama dengan pihak swasta atau mitra pembangunan. Kerjasama lintas instansi dan lintas sekor dari berbagai pemangku kebijakan terkait sanitasi sekolah sangat diharapkan sehingga seluruh sekolah di Indonesia dapat memiliki akses air, sanitasi dan kebersihan (CTPS).



Satuan biaya penyediaan sarana air minum diperkirakan antara 5 sampai 25 juta rupiah per Satuan Pendidikan. Misalnya untuk penggalian sumur atau menyambungkan dengan sistem PDAM,



Satuan biaya penyediaan sarana sanitasi diperkirakan antara 100 sampai dengan 150 juta rupiah per Satuan Pendidikan. Perkiraan ini berdasarkan rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan sarana sanitasi baru.



Satuan biaya penyediaan sarana kebersihan atau Cuci Tangan Pakai Sabun diperkirakan antara 10 sampai 20 juta rupiah per Satuan Pendidikan. Perkiraan ini berdasarkan Buku Panduan Opsi Sarana CTPS.

Tabel : Analisa Biaya Modal Sanitasi Sekolah

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Total Satuan Pendidikan Tanpa Akses			Total Rata-rata Biaya Investasi			Total
		Air	Sanitasi	Kebersihan	Air IDR 15,000,000	Sanitasi IDR 125,000,000	Kebersihan IDR 15,000,000	
Indonesia		82,572	309,775	251,304	1,238,580,000,000	38,721,875,000,000	3,769,560,000,000	43,730,015,000,000
1	Prov. Aceh	2,583	8,395	7,244	38,745,000,000	1,049,375,000,000	108,660,000,000	1,196,780,000,000
2	Prov. Bali	897	3,462	2,270	13,455,000,000	432,750,000,000	34,050,000,000	480,255,000,000
3	Prov. Banten	2,223	9,383	7,555	33,345,000,000	1,172,875,000,000	113,325,000,000	1,319,545,000,000
4	Prov. Bengkulu	752	3,268	2,483	11,280,000,000	408,500,000,000	37,245,000,000	457,025,000,000
5	Prov. D.I. Yogyakarta	442	5,568	3,236	6,630,000,000	696,000,000,000	48,540,000,000	751,170,000,000
6	Prov. D.K.I. Jakarta	427	4,424	3,684	6,405,000,000	553,000,000,000	55,260,000,000	614,665,000,000
7	Prov. Gorontalo	907	2,411	1,927	13,605,000,000	301,375,000,000	28,905,000,000	343,885,000,000
8	Prov. Jambi	1,534	5,596	4,457	23,010,000,000	699,500,000,000	66,855,000,000	789,365,000,000
9	Prov. Jawa Barat	8,661	42,518	34,747	129,915,000,000	5,314,750,000,000	521,205,000,000	5,965,870,000,000
10	Prov. Jawa Tengah	4,684	36,844	29,369	70,260,000,000	4,605,500,000,000	440,535,000,000	5,116,295,000,000
11	Prov. Jawa Timur	7,793	51,144	39,180	116,895,000,000	6,393,000,000,000	587,700,000,000	7,097,595,000,000
12	Prov. Kalimantan Barat	3,668	6,313	6,245	55,020,000,000	789,125,000,000	93,675,000,000	937,820,000,000
13	Prov. Kalimantan Selatan	1,791	5,823	3,780	26,865,000,000	727,875,000,000	56,700,000,000	811,440,000,000
14	Prov. Kalimantan Tengah	2,811	5,347	4,641	42,165,000,000	668,375,000,000	69,615,000,000	780,155,000,000
15	Prov. Kalimantan Timur	1,517	3,646	3,317	22,755,000,000	455,750,000,000	49,755,000,000	528,260,000,000
16	Prov. Kalimantan Utara	482	951	895	7,230,000,000	118,875,000,000	13,425,000,000	139,530,000,000
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	268	1,262	852	4,020,000,000	157,750,000,000	12,780,000,000	174,550,000,000
18	Prov. Kepulauan Riau	569	1,668	1,173	8,535,000,000	208,500,000,000	17,595,000,000	234,630,000,000
19	Prov. Lampung	1,828	9,736	7,863	27,420,000,000	1,217,000,000,000	117,945,000,000	1,362,365,000,000
20	Prov. Maluku	1,791	3,885	2,891	26,865,000,000	485,625,000,000	43,365,000,000	555,855,000,000
21	Prov. Maluku Utara	931	2,967	2,173	13,965,000,000	370,875,000,000	32,595,000,000	417,435,000,000
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	1,939	7,661	5,543	29,085,000,000	957,625,000,000	83,145,000,000	1,069,855,000,000
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	6,895	10,368	8,589	103,425,000,000	1,296,000,000,000	128,835,000,000	1,528,260,000,000
24	Prov. Papua	2,720	4,218	4,109	40,800,000,000	527,250,000,000	61,635,000,000	629,685,000,000
25	Prov. Papua Barat	1,175	1,944	1,723	17,625,000,000	243,000,000,000	25,845,000,000	286,470,000,000
26	Prov. Riau	2,419	7,295	6,763	36,285,000,000	911,875,000,000	101,445,000,000	1,049,605,000,000
27	Prov. Sulawesi Barat	1,132	3,146	2,612	16,980,000,000	393,250,000,000	39,180,000,000	449,410,000,000
28	Prov. Sulawesi Selatan	3,466	12,071	9,494	51,990,000,000	1,508,875,000,000	142,410,000,000	1,703,275,000,000
29	Prov. Sulawesi Tengah	2,033	6,056	5,010	30,495,000,000	757,000,000,000	75,150,000,000	862,645,000,000
30	Prov. Sulawesi Tenggara	1,946	5,013	4,210	29,190,000,000	626,625,000,000	63,150,000,000	718,965,000,000
31	Prov. Sulawesi Utara	1,431	4,720	3,533	21,465,000,000	590,000,000,000	52,995,000,000	664,460,000,000
32	Prov. Sumatera Barat	2,224	7,722	6,811	33,360,000,000	965,250,000,000	102,165,000,000	1,100,775,000,000
33	Prov. Sumatera Selatan	2,713	8,692	7,470	40,695,000,000	1,086,500,000,000	112,050,000,000	1,239,245,000,000
34	Prov. Sumatera Utara	5,920	16,258	15,455	88,800,000,000	2,032,250,000,000	231,825,000,000	2,352,875,000,000

6.2 ANALISA BIAYA OPERASIONAL SANITASI SEKOLAH

Biaya operasional adalah biaya yang harus dibayarkan secara berkala untuk melaksanakan kegiatan pokok, seperti pada saat penggunaan, pembersihan dan perbaikan serta perawatan fasilitas. Selain itu, biaya operasional juga termasuk kegiatan promosi Cuci Tangan Pakai Sabun, pembersihan toilet, membeli sabun dan sebagainya. Dibawah ini perhitungan biaya operasional Sanitasi Sekolah per peserta didik. Analisa ini berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Save the Children di Indonesia Tahun 2016. Rata-rata biaya operasional adalah Rp. 45,000,- per peserta didik setiap tahunnya. Dibawah ini adalah contoh simulasi biaya operasional sarana sanitasi sekolah selama satu tahun.

Daftar Anggaran dan Tanggung jawab				
Kegiatan	Jenis	Harga	Biaya per Tahun Ajaran	Penanggung jawab (Kelas - Sekolah)
Penggunaan	Sabun Cuci Tangan	/Bulan		
	Air	/Bulan		
	Geyung	/Bulan		
	Tempat Sampah	/Bulan		
	Ember	/Bulan		
Pembersihan	Deterjan dan Lap Pembersih	/Bulan		
	Sikat Lantai Bertangkai	/Bulan		
	Sikat Toilet	/Bulan		
	Botol Penyemprot	/Bulan		
Perbaikan dan Perawatan	Alat Penyedot	/Bulan		
	Kunci Inggris	/Bulan		
	Ondardil Pipe Air	/Bulan		
	Keran	/Bulan		
	Kloset	/Bulan		
	Salotip	/Bulan		
	Kunci Pintu	/Bulan		
Jumlah:				

Komponen Biaya Perbaikan Sarana Sanitasi Sekolah

Komponen Biaya	Biaya (IDR)
Perbaikan sistem air	750
Perbaikan toilet/jamban	152
Perbaikan sarana cuci tangan	3,250
Total	4,152

Komponen Biaya Operasional dan Perawatan Sarana Sanitasi Sekolah

Komponen Biaya	Biaya (IDR)
Operasional dan Pemeliharaan Sarana Air	4,569
Pembelian air	3,175
Operasional dan Pemeliharaan Sarana CTPS	1,276
Pembelian barang habis pakai CTPS, contoh sabun	5,125
Pembersihan Toilet	21,250
Pembelian material pembersih toilet	625
Kegiatan pembiasaan Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	4,125
Total	40,145

7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



7.1 KESIMPULAN

Pada tingkat global, Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam SDGs tujuan 4a, 6.1 dan 6.2. Tujuan 4a adalah “Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dengan beberapa indikator sedangkan tujuan 6.1 adalah “mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua” dan 6.2 adalah “mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan”. Berdasarkan Analisa data yang ada, maka terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

- Secara umum kondisi akses pada sumber air yang layak cukup tinggi. Rata-rata nasional untuk akses pada sumber air yang layak adalah 81%.
- Akses pada fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara laki-laki dan perempuan sangat rendah. Rata-rata nasional untuk fasilitas jamban yang berfungsi dan terpisah antara laki-laki dan perempuan adalah 27%.
- Perhatian dunia pendidikan pada kesehatan dan kebersihan diri masih rendah. Hanya 41% satuan pendidikan di Indonesia yang memiliki akses pada fasilitas cuci tangan di sekolah.
- Menyadari pentingnya penyediaan akses dasar sanitasi sekolah, maka dilakukan Analisa indeks sanitasi sekolah untuk melihat pemenuhan ketiga indikator yang ada di sekolah. Cakupan tertinggi ada pada jenjang SMA sebesar 35% dan cakupan terendah ada pada jenjang PAUD sebesar 4%.
- Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta (38,16%), Provinsi Bali (27,66%) dan Provinsi Bangka Belitung (26,29%) adalah tiga provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah tertinggi untuk semua jenjang sementara Provinsi Sulawesi Barat (5,31%), Provinsi Maluku (7,25%) dan Provinsi Maluku Utara (7,26%) adalah tiga provinsi dengan indeks Sanitasi Sekolah terendah untuk semua jenjang.



7.2 REKOMENDASI

Berdasarkan Analisa data yang dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan pada para pengambil kebijakan, baik di tingkat sekolah, dinas maupun kementerian, yaitu:

- Perlu ada percepatan pemenuhan ketersediaan sarana sanitasi sekolah melalui Dana Alokasi Khusus dan mekanisme pembiayaan lain. Misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau bekerjasama dengan pihak swasta melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Perlu ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan verifikasi data Sanitasi Sekolah;
- Perlu ada peningkatan kepemilikan dan kepemimpinan dari sektor pendidikan di berbagai jenjang untuk arah strategis sanitasi sekolah dalam kemitraan dengan sektor terkait lainnya dan para pemangku kepentingan. Kebijakan yang mendukung perlu diperkuat, akuntabilitas dipelihara dan koordinasi perlu ditingkatkan agar tercipta kolaborasi yang efektif di semua tingkatan;
- Perlu ada penguatan sistem pemantauan kondisi sanitasi sekolah yang dilaporkan secara berkala di tingkat pusat sampai tingkat sekolah untuk memicu peningkatan layanan sanitasi sekolah;
- Perlu adanya apresiasi pada setiap kemajuan yang dilakukan oleh daerah dan sekolah melalui akreditasi nasional untuk memotivasi pencapaian kondisi sanitasi sekolah yang layak.



DAFTAR REFERENSI

- Save the Children, Operation and Maintenance Financing for School WASH Facilities in Indonesia, 2016, Save the Children
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, Generasi Berkualitas Dimulai dari Sekolah, melaksanakan pembangunan sanitasi sekolah dasar, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, Pedoman Pelaksanaan UKS/M, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- GIZ, 2015, Pedoman untuk Komunitas Sekolah, Fit for School, Edisi 2, GIZ Fit for School
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, Profil Sanitasi Sekolah Tahun 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, Peta Jalan Sanitasi Sekolah Dalam Kerangka UKS, 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Buku Panduan Pengisian Data Sanitasi Sekolah Melalui DAPODIK 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Panduan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Sanitasi Sekolah, 2018, Jakarta, Bappenas
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018, Panduan Manajemen Kebersihan Menstruasi bagi Guru dan Orang Tua, brosur, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Panduan Opsi Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun, 2020, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN: TANGGA PELAYANAN SANITASI SEKOLAH

Tangga Pelayanan Sanitasi Sekolah: Indikator Air Minum (W)



Tangga Pelayanan Sanitasi Sekolah: Indikator Sanitasi (S)



Tangga Pelayanan Sanitasi Sekolah1: Indikator Kebersihan Diri (H)



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SNV



supported by giz



Diterbitkan oleh



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Didukung oleh:



Implemented by: **giz** Technische Dienstleistung für internationale Zusammenarbeit